

STUDI TENTANG FUNGSI KOORDINASI DALAM KBIH AMANAT BANGSA SURABAYA

SKRIPSI

Diajukan kepada Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Dalam Menyelesaikan
Program Sarjana Sosial Islam (S.Sos.I)



Oleh :

ZUHAN NASUKHAH

NIM : BO.43.01.032

K
D-2006
014
MO

PERPUSTAKAAN
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA

No. REG D/2006/MB/014

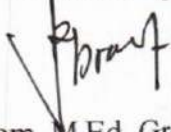
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
FAKULTAS DAKWAH
JURUSAN MANAJEMEN DAKWAH
2006

PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI

Skripsi oleh Zuhan Nasukhah ini telah diperiksa dan disetujui untuk diujikan.

Surabaya, 21 Januari 2006

Pembimbing



Drs. Muhtarom, M.Ed, Gred. Dip. Tesol
NIP. 150 256 873

PENGESAHAN TIM PENGUJI SKRIPSI

Skripsi oleh Zuhan Nasukhah ini telah dipertahankan di depan Tim Penguji Skripsi

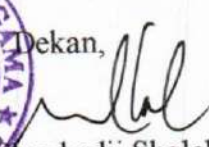
Surabaya, 15 Pebruari 2006

Mengesahkan,
Fakultas Dakwah

Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya




Dekan,


DR. H. Shonhadji Sholeh

NIP. 150 194 059

Ketua,


Drs. Muhtarom, M.Ed, Gred. Dip. Tesol

NIP. 150 256 873

Sekretaris


Bambang Subandi, M.Ag

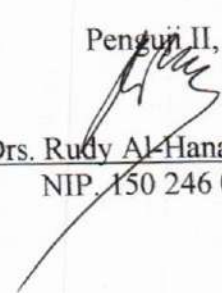
NIP. 150 311 332

Penguji I,


Drs. H. M. Nadim Zuhdi, M.M

NIP. 150 152 383

Penguji II,


Drs. Rudy Al-Hana, M.Ag

NIP. 150 246 022

ABSTRAKSI

Zuhan Nasukhah, 2006 : *Studi Tentang Fungsi Koordinasi Dalam KBIH Amanat Bangsa Surabaya.*

Masalah yang diteliti dalam skripsi ini adalah: 1). Bagaimana koordinasi yang diterapkan oleh KBIH Amanat Bangsa ?. 2). Faktor apa yang mendukung dan menghambat terwujudnya koordinasi di KBIH Amanat Bangsa ?.

Dalam menjawab permasalahan tersebut, metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif. Dan analisis data yang digunakan adalah analisis domain (*domain analysis*). Dengan menggunakan metode dan teknik analisis data tersebut, maka diperoleh suatu kesimpulan bahwa koordinasi yang diterapkan di KBIH Amanat Bangsa adalah koordinasi horizontal. Artinya pengurus KBIH Amanat Bangsa senantiasa menerapkan prinsip kesejajaran dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya masing-masing. Sehingga dalam melaksanakan tugasnya, mereka senantiasa berkomunikasi sebagai wujud dari koordinasi dengan pengurus KBIH Amanat Bangsa yang lainnya. Sedangkan faktor pendukung terwujudnya koordinasi di KBIH Amanat Bangsa antara lain: *pertama*, adanya kenyataan bahwa KBIH Amanat Bangsa senantiasa konsern pada upaya pemberian pelayanan dan bimbingan ibadah haji maupun umrah. *Kedua*, jama'ah haji maupun umrah yang bergabung dalam KBIH Amanat Bangsa secara umum memiliki tingkat ekonomi di atas rata-rata. *Ketiga*, adanya kenyataan bahwa KBIH Amanat Bangsa seringkali menyelenggarakan kegiatan keagamaan maupun aksi sosial di masyarakat. *Keempat*, mayoritas pengurus KBIH Amanat Bangsa bertempat tinggal tidak jauh dari lokasi KBIH. Dan *kelima*, ketua umum KBIH Amanat Bangsa, yakni Bapak Drs. K.H. Asep Syaifuddin Chalim, M.A. adalah orang yang cukup dikenal. Sementara itu, faktor yang menjadi penghambat terwujudnya proses koordinasi di KBIH Amanat Bangsa antara lain: *pertama*, area KBIH Amanat Bangsa yang kurang strategis. *Kedua*, minimnya fasilitas kantor kesekretariatan yang dimiliki oleh KBIH Amanat Bangsa. Dan *ketiga*, kurangnya tenaga administrasi, khususnya yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan.

Sebagai upaya solusi atas koordinasi yang diterapkan oleh KBIH Amanat Bangsa dan faktor pendukung serta penghambat terwujudnya koordinasi di KBIH Amanat Bangsa, maka ada dua hal yang perlu menjadi pertimbangan pengurus KBIH Amanat Bangsa dalam melakukan proses koordinasi di masa-masa mendatang: *pertama*, hendaknya pengurus KBIH Amanat Bangsa mempertahankan model koordinasi horizontal yang selama ini telah diterapkan. Dan *kedua*, hendaknya pengurus KBIH Amanat Bangsa senantiasa berupaya semaksimal mungkin untuk menekan faktor penghambat terwujudnya proses koordinasi, misalnya dengan cara menyisihkan sebagian keuntungan yang diperoleh untuk melengkapi fasilitas KBIH.

DAFTAR ISI STAKAAN	
IAIN SUNGAI PAKEL SURABAYA	
No. Revisi K D-2006 019 MB	D/2006/MB/019

	Halaman
JUDUL PENELITIAN	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI	ii
PENGESAHAN TIM PENGUJI SKRIPSI	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAKSI	viii
DAFTAR ISI	ix
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Konteks Penelitian	1
B. Fokus Penelitian	4
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	5
E. Definisi Konsep	6
F. Sistematika Pembahasan	7
BAB II : PERSPEKTIF TEORITIS	9
A. Kajian Kepustakaan Konseptual	9
1. Koordinasi	9
2. Kelompok Bimbingan Ibadah Haji (KBIH)	26
B. Kajian Kepustakaan Penelitian	34
BAB III : METODE PENELITIAN	38
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian	38
B. Wilayah Penelitian	39
C. Jenis dan Sumber Data	40
D. Tahap-tahap Penelitian	41
1. Tahap Pralapanan	41
2. Tahap Pekerjaan Lapangan	43
3. Tahap Analisis Data	44
E. Teknik Pengumpulan Data	44
1. Teknik Wawancara (<i>Interview</i>)	45
2. Teknik Pengamatan (<i>Observasi</i>)	46
3. Teknik Dokumentasi	47
F. Teknik Analisis Data	47

G. Teknik Keabsahan Data	48
1. Ketekunan Pengamatan	49
2. Triangulasi	49
3. Pemeriksaan Teman Sejawat Melalui Diskusi	50
 BAB IV : DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN	52
A. Letak Geografis KBIH Amanat Bangsa	52
B. Sejarah Berdirinya KBIH Amanat Bangsa	52
C. Struktur Kepengurusan di KBIH Amanat Bangsa	56
D. Program-program Kerja KBIH Amanat Bangsa	58
E. Mekanisme Perekrutan Calon Jama'ah Haji di KBIH Amanat Bangsa	59
F. Beberapa Persyaratan Menjadi Calon Jama'ah Haji di KBIH Amanat Bangsa	61
G. Kegiatan Bimbingan Ibadah Haji di KBIH Amanat Bangsa	63
H. Beberapa Kelebihan KBIH Amanat Bangsa	64
 BAB V : PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA	66
A. Penyajian Data	66
1. Koordinasi yang Diterapkan di KBIH Amanat Bangsa	66
2. Faktor Pendukung dan Penghambat Terwujudnya Koordinasi di KBIH Amanat Bangsa	68
B. Analisis Data tentang Koordinasi yang Diterapkan di KBIH Amanat Bangsa dan Faktor Pendukung serta Penghambat Terwujudnya Koordinasi di KBIH Amanat Bangsa	70
 BAB VI : PENUTUP	73
A. Kesimpulan	73
B. Rekomendasi	74

DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Di era globalisasi seperti sekarang ini, sejalan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi yang serba modern dan canggih, sudah menjadi kewajiban kita untuk melaksanakan kegiatan dakwah. Hal ini dikarenakan Islam merupakan agama dakwah yang menegaskan setiap umatnya untuk menyebarkan dan menyiarkan Islam kepada sesamanya. Usaha untuk menyebarkan Islam sering berkaitan dengan keberadaan sebuah organisasi atau lembaga yang berperan aktif dalam menyebarkan ajaran-ajaran Islam. Sebuah organisasi harus dapat mengantisipasi perubahan-perubahan yang terjadi. Untuk itu, organisasi harus mampu menghadapi masalah-masalah yang semakin kompleks dalam manajemen dakwah Islam pada masa kini.

Haimann, –yang dikutip Manullang– mengatakan bahwa manajemen adalah fungsi untuk mencapai sesuatu melalui kegiatan orang lain dan mengawasi usaha-usaha individu untuk mencapai tujuan bersama.¹ Dalam manajemen yang baik, terdapat fungsi-fungsi manajemen, antara lain: perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*), pengarahan (*directing*), koordinasi (*coordinating*),

¹ M. Manullang, *Dasar-dasar Manajemen* (Medan: Ghalia Indonesia, 1996), h. 14.

dan pengawasan (*controlling*). Fungsi manajemen tersebut saling mempunyai keterkaitan antara yang satu dengan yang lainnya. Namun dalam penelitian ini, peneliti sengaja lebih memfokuskan pembahasan mengenai fungsi koordinasi. Hal itu disebabkan adanya pertimbangan bahwa tanpa melibatkan unsur koordinasi dalam melakukan aktivitas organisasi, maka niscaya aktivitas organisasi tidak akan berjalan dengan baik sesuai tujuan yang diinginkan.

Adapun yang dimaksud dengan koordinasi adalah usaha mengarahkan kegiatan seluruh unit-unit organisasi dengan tujuan memberikan sumbangan yang maksimal bagi tercapainya tujuan tertentu. Jadi, koordinasi merupakan usaha yang terkoordinir, harmonis, terarah, dan terintegrasi menuju tujuan secara bersama-sama. Hal ini dimaksudkan untuk menyatukan kegiatan dari berbagai kelompok pelaksana secara bersama-sama dalam mencapai tujuan.

Koordinasi diperlukan dalam setiap organisasi. Hal ini disebabkan dalam organisasi pasti terdapat departementasi. Keberadaan departementasi bertujuan untuk menyusun satuan-satuan organisasi dalam melaksanakan tugas. Adanya pembagian organisasi dalam satuan organisasi, maka terjadilah pembagian kerja. Dalam pembagian kerja, terkait dengan pimpinan yang harus mendudukinya. Masing-masing satuan organisasi mempunyai tugas dan tanggung jawab sendiri dan seringkali karena terlalu memperhatikan tugasnya sendiri, cenderung lupa tujuan organisasi secara keseluruhan. Oleh karena itu, seorang manajer perlu melakukan koordinasi.²

² Widjaya, *Perencanaan sebagai Fungsi Manajemen* (Jakarta: Bina Aksara, 1987), h. 27.

Di dalam melaksanakan dan mengadakan kegiatannya, manajer harus tetap mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan tersebut agar tujuan organisasi dapat tercapai secara efektif. Sebagian besar juga tergantung dari bawahan atau anggota organisasi guna menyadari dan mewujudkan komitmennya terhadap organisasi. Oleh sebab itu, peranan dari seorang koordinator sangat berat. Tugas yang besar dan peranan yang ganda ini diperlukan dalam pengambilan suatu tanggung jawab agar dapat mengkoordinasi proses kerja sama secara terus menerus dan berkesinambungan. Jadi, seorang koordinator harus memiliki kemahiran manajemen dan kualitas kepemimpinan.

Berkaitan dengan urgensi penerapan koordinasi dalam sebuah organisasi, Kelompok Bimbingan Ibadah Haji (selanjutnya disingkat KBIH) Amanat Bangsa yang berlokasi di Jl. Siwalankerto Utara No. 56 Surabaya merupakan salah satu organisasi yang berupaya menerapkan koordinasi dalam aktivitas organisasinya. Beberapa faktor yang menegaskan bahwa KBIH Amanat Bangsa telah menerapkan koordinasi dalam aktivitas organisasinya adalah menyangkut proses awal pendaftaran haji, pemberangkatan, pelaksanaan haji, sampai kembalinya jamaah haji di Indonesia. Jadi, tanpa adanya koordinasi yang baik, maka mustahil penyelenggaraan ibadah haji akan dapat berjalan seperti yang di inginkan.

Merujuk pada deskripsi tentang konteks penelitian di atas, maka hal itulah yang mendasari peneliti untuk mengkaji secara lebih mendalam mengenai koordinasi yang diterapkan oleh KBIH Amanat Bangsa dalam rangka memberikan pelayanan dan bimbingan ibadah haji kepada para anggota

masyarakat yang bergabung di KBIH Amanat Bangsa. Pertimbangan mendasar yang melatar belakangi penelitian ini antara lain: *pertama*, penelitian yang mengkaji tentang fungsi koordinasi di KBIH Amanat Bangsa belum pernah dilakukan oleh peneliti terdahulu. Sehingga penelitian ini sengaja disajikan untuk mengisi kekosongan tersebut. *Kedua*, bidang kajian yang dibedah dalam penelitian ini yakni berkaitan dengan fungsi koordinasi di KBIH Amanat Bangsa, cukup menarik untuk dijadikan tema sentral pembahasan. Dan *ketiga*, ketertarikan peneliti mengkaji permasalahan tentang fungsi koordinasi di KBIH Amanat Bangsa karena dirasa terdapat kesesuaian dengan disiplin keilmuan yang peneliti tekuni di Jurusan Manajemen Dakwah, Fakultas Dakwah, IAIN Sunan Ampel Surabaya selama ini.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan konteks penelitian di atas, guna pembahasan lebih lanjut dalam penulisan skripsi ini, maka peneliti merumuskan masalah penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana koordinasi yang diterapkan oleh KBIH Amanat Bangsa ?
2. Faktor apa yang mendukung dan menghambat terwujudnya koordinasi di KBIH Amanat Bangsa ?

C. Tujuan Penelitian

Merujuk pada fokus penelitian di atas, maka penulisan skripsi ini bertujuan:

1. Untuk mengetahui koordinasi yang diterapkan oleh KBIH Amanat Bangsa.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mendukung dan menghambat terwujudnya koordinasi di KBIH Amanat Bangsa.

D. Manfaat Penelitian

Melalui penulisan skripsi ini, peneliti berharap semoga nantinya dapat membawa manfaat, baik secara teoritis maupun praktis.

1. Manfaat secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat secara teoritis dalam upaya pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang yang berkaitan dengan penerapan fungsi koordinasi dalam mewujudkan tujuan organisasi.

2. Manfaat secara Praktis

- a. Diharapkan sebagai bahan masukan dan acuan dalam pelaksanaan fungsi koordinasi di KBIH Amanat Bangsa.
- b. Untuk memperkaya khazanah ilmu pengetahuan di bidang manajemen, khususnya yang berkaitan dengan fungsi koordinasi bagi Jurusan Manajemen Dakwah, Fakultas Dakwah, IAIN Sunan Ampel Surabaya.

E. Definisi Konsep

Untuk menghindari terjadinya kesalahan persepsi dalam memahami penelitian ini, maka peneliti akan menjelaskan konsepsi teoritis tentang judul yang diangkat dalam penelitian ini, yaitu antara lain:

- Fungsi Koordinasi

Fungsi koordinasi adalah proses pengintegrasian tujuan-tujuan dan kegiatan-kegiatan dari satuan-satuan yang terpisah (unit-unit) suatu organisasi untuk mencapai tujuan organisasi secara efisien.³ Fungsi koordinasi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah fungsi koordinasi yang diterapkan oleh KBIH Amanat Bangsa.

- Haji

Haji adalah berkunjung ke Baitullah (Ka'bah) untuk melaksanakan beberapa amalan, antara lain: *wukuf, thawaf, sa'i*, dan amalan lainnya pada masa tertentu demi memenuhi panggilan Allah SWT dan mengharapkan ridha-Nya.

- Kelompok Bimbingan Ibadah Haji (KBIH) Amanat Bangsa

Adalah sebuah organisasi yang berusaha membantu calon jama'ah haji dalam rangka menunaikan ibadah haji agar hajinya terlaksana dengan baik dan sempurna, sehingga dapat mencapai haji yang mabrur.

³ Dydiet Hardjito, *Teori Organisasi dan Teknik Pengorganisasian* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), h. 47.

F. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah penulisan skripsi ini dan guna sistematisasi dalam pembahasannya, berikut ini akan peneliti deskripsikan formulasi sistematika pembahasan dalam skripsi ini, yang terdiri dari:

Bab I : Pendahuluan, yang mengandung pembahasan tentang konteks penelitian, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi konsep, dan sistematika pembahasan.

Bab II : Perspektif Teoritis, yang berisi pembahasan mengenai kajian kepustakaan konseptual yang memuat kajian tentang koordinasi (pengertian koordinasi, prinsip dan ciri-ciri koordinasi, kebutuhan akan koordinasi, fungsi koordinasi, manfaat koordinasi, pendekatan untuk pencapaian koordinasi yang efektif, teknik pengkoordinasian, dan pelaksanaan koordinasi), kelompok bimbingan ibadah haji/KBIH (pengertian haji, syarat-syarat wajib haji, rukun haji, sunnah haji, dan hikmah ibadah haji), dan kajian kepustakaan penelitian.

Bab III : Metode Penelitian, yang mengandung pembahasan tentang pendekatan dan jenis penelitian, wilayah penelitian, jenis dan sumber data, tahap-tahap penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, dan teknik keabsahan data.

Bab IV : Deskripsi Lokasi Penelitian, yang mengandung pembahasan mengenai letak geografis KBIH Amanat Bangsa, sejarah berdirinya KBIH Amanat Bangsa, struktur kepengurusan di KBIH Amanat Bangsa, program-program kerja KBIH Amanat Bangsa, mekanisme perekrutan calon jama'ah haji

di KBIH Amanat Bangsa, beberapa persyaratan menjadi calon jama'ah haji di KBIH Amanat Bangsa, kegiatan bimbingan ibadah haji di KBIH Amanat Bangsa, dan beberapa kelebihan KBIH Amanat Bangsa.

Bab V : Penyajian dan Analisis Data, yang mengandung pembahasan mengenai penyajian data tentang koordinasi yang diterapkan oleh KBIH Amanat Bangsa dan faktor pendukung serta penghambat terwujudnya koordinasi di KBIH Amanat Bangsa. Serta analisis data tentang koordinasi yang diterapkan oleh KBIH Amanat Bangsa dan faktor pendukung serta penghambat terwujudnya koordinasi di KBIH Amanat Bangsa.

Bab VI : Penutup, yang berisi kesimpulan dan rekomendasi.

BAB II

PERSPEKTIF TEORITIS



A. Kajian Kepustakaan Konseptual

1. Koordinasi

a. Pengertian Koordinasi

Istilah koordinasi berasal dari bahasa Inggris ‘*coordination*’. Sedangkan kata *coordinate* terbentuk dari dua akar kata yaitu: *to* dan *ordinate* yang mempunyai arti mengatur. Dengan demikian istilah koordinasi mengandung makna pengaturan.¹ Sementara itu, pengertian koordinasi menurut istilah, banyak dikemukakan oleh para ahli ilmu manajemen. Dydiet Hardjito dalam bukunya yang berjudul “*Teori Organisasi dan Teknik Pengorganisasian*”, menuturkan bahwa koordinasi dapat dimaknai sebagai proses pengintegrasian tujuan-tujuan dan kegiatan-kegiatan dari satuan-satuan yang terpisah (unit-unit) suatu organisasi untuk mencapai tujuan organisasi secara efisien.² Sedangkan Sutarto, dalam bukunya yang berjudul “*Dasar-dasar Organisasi*”

¹ I.GK. Manila, *Praktek Manajemen Pemerintahan dalam Negeri* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1996), h. 42.

² Dydiet Hardjito, *Teori Organisasi dan Teknik Pengorganisasian* (Jakarta: Grafindo Persada, 1997), h. 47.

mengutip pendapat beberapa ahli manajemen mengenai pengertian koordinasi³, yakni antara lain:

- 1) James D. Money, memberikan pengertian koordinasi sebagai pengaturan usaha sekelompok orang secara teratur untuk menciptakan kesatuan tindakan dalam mengusahakan tercapainya suatu tujuan bersama.
- 2) Leonard D. White, memberikan makna koordinasi sebagai penyesuaian diri dari bagian-bagian satu sama lain, dan gerakan serta pengerjaan bagian-bagian pada saat yang tepat sehingga masing-masing dapat memberikan sumbangan yang maksimum pada hasil secara keseluruhan.
- 3) A.E. Benn, mengatakan bahwa koordinasi adalah suatu kelangsungan, keharmonisan mencapai tujuan yang dapat dicapai melalui kepemimpinan, organisasi dan administrasi. Koordinasi juga dapat dimaknai sebagai penyusunan usaha-usaha kelompok di dalam suatu kelangsungan dan keteraturan sikap sehingga menciptakan kesatuan tindakan dalam mengusahakan tercapainya tujuan bersama.
- 4) Dalton E. McFarland, berpendapat bahwa koordinasi adalah proses dimana pimpinan mengembangkan pola yang teratur dari usaha

³ Sutarto, *Dasar-dasar Organisasi*, Cet. 17 (Jakarta: Gajah Mada University Press, 1996), hh. 141-145.

kelompok diantara para bawahannya dan kepastian kesatuan tindakan dalam usaha mencapai tujuan bersama.

- 5) Roger C. Heimer, memberikan penekanan bahwa koordinasi harus ada untuk menyempurnakan banyak usaha agar supaya pencapaian tujuan berjalan secara efektif. Koordinasi memungkinkan kesatuan usaha mental dan fisik dalam bermacam-macam sikap karena menciptakan kelebihan usaha yang di koordinasikan pada sejumlah usaha individu dari para peserta.
- 6) Robert Livingstone, memandang bahwa koordinasi merupakan hubungan antar berbagai faktor organisasi. Tidak sukar mengorganisasi kegiatan tunggal, tetapi untuk mengorganisasi macam-macam kegiatan di dalam ketunggalan adalah merupakan pencapaian yang sukar. Koordinasi membuat organisasi "baik". Ini adalah suatu sistem keseimbangan dan kontrol, tantangan dan tanggapan, yang ada di antaranya dan di antara satuan-satuan dalam organisasi.
- 7) Catheryn Seckler Hudson, merumuskan makna koordinasi sebagai kewajiban sangat penting dari hubungan antar bermacam-macam satuan kerja.
- 8) Henry Fayol, menuturkan bahwa mengkoordinasi berarti mengikat bersama, menyatukan, dan menselaraskan semua kegiatan dan usaha.

- 9) E.F.L. Brech, memberikan arti koordinasi sebagai menseimbangkan dan mengeratkan tim dengan memberikan alokasi kegiatan bekerja yang sesuai kepada masing-masing anggotanya, dan menjaga agar kegiatan itu dilaksanakan dengan keselarasan yang semestinya antara para anggota itu sendiri.
- 10) Harold Koontz & Cyril O'Donnell, berpendapat bahwa koordinasi adalah pencapaian keselarasan usaha individu dalam usaha mencapai tujuan serta sasaran kelompok.
- 11) William R. Spriegel, mengatakan bahwa koordinasi dapat diberi pengertian sebagai sinkronisasi usaha yang bertitik pangkal waktu dan urutan pelaksanaan.
- 12) George R. Terry, merumuskan pengertian koordinasi sebagai sinkronisasi yang teratur dari usaha-usaha untuk menciptakan kepantasan kuantitas, waktu, dan pengarahannya pelaksanaan yang menghasilkan keselarasan dan kesatuan tindakan untuk tujuan yang telah ditetapkan.
- 13) Herbert G. Hicks, mengatakan bahwa pada hakikatnya prinsip koordinasi menerangkan tentang pelaksanaan organisasi itu efektif apabila semua orang dan sumber di sinkronkan, di seimbangkan, dan diberikan pengarahannya.

Dari beragam variasi mengenai pengertian koordinasi di atas, maka dapat diambil sebuah kesimpulan bahwa pada dasarnya koordinasi merupakan sebuah upaya yang dilakukan untuk mensinkronkan individu-individu dalam organisasi yang mempunyai karakteristik berbeda menuju suatu tujuan yang ingin dicapai bersama.

b. Prinsip dan Ciri-ciri Koordinasi

Mooney dan Reiley, –yang dikutip I.GK. Manila– berpendapat bahwa pada hakikatnya prinsip-prinsip dalam koordinasi itu ada dua, yaitu:

- 1) Susunan yang teratur dari usaha kelompok untuk menciptakan proses bertingkat secara hirarkis bergerak dari atas ke bawah berdasarkan rantai kewenangan dalam struktur organisasi.
- 2) Adanya kewenangan yang merupakan kekuasaan untuk mengkoordinasikan.⁴

Sedangkan menurut Hellriegel dan Slocum, –yang dikutip Dydiat Hardjito– prinsip-prinsip koordinasi pada dasarnya terdiri dari tiga prinsip dasar, yaitu:

- 1) Prinsip kesatuan komando (*The Unity of Command Principle*), yaitu mempunyai satu pemimpin saja.

⁴ I.GK. Manila, *Praktek Manajemen Pemerintahan dalam Negeri*, hh. 43-44.

- 2) Prinsip tangga (*The Scalar Principle*), yaitu menunjukkan lebih jelas dan menandakan adanya rantai komando yang tidak terputus (mantap) antara anggota organisasi dengan atasan langsungnya.
- 3) Prinsip rentang kendali (*Span of Control*), yaitu menunjukkan model yang tertua, yang masih digunakan sampai sekarang.⁵

Sementara itu, ciri-ciri pokok koordinasi dapat diketahui dengan memperhatikan beberapa faktor berikut ini:

- 1) Tanggung jawab koordinasi terletak pada pimpinan, karena itu koordinasi adalah menjadi wewenang dan tanggung jawab pimpinan. Pimpinan yang berhasil, mencerminkan koordinasi yang telah dilakukannya berjalan dengan baik.
- 2) Koordinasi merupakan suatu usaha kerja sama. Hal ini disebabkan karena kerja sama merupakan syarat mutlak untuk terselenggaranya koordinasi yang baik.
- 3) Koordinasi adalah proses yang terus menerus (*continuing process*). Artinya suatu proses yang berkesinambungan dalam rangka tercapainya tujuan organisasi.
- 4) Adanya pengaturan usaha kelompok secara teratur. Hal ini karena koordinasi adalah konsep yang diterapkan dalam kelompok, bukan terhadap usaha individu.

⁵ Dydiat Hardjito, *Teori Organisasi dan Teknik Pengorganisasian*, hh. 55-58.

- 5) Konsep kesatuan tindakan. Kesatuan tindakan adalah inti dari koordinasi. Hal ini berarti bahwa pimpinan harus mengatur usaha-usaha/tindakan-tindakan dari setiap kegiatan individu sehingga diperoleh adanya keserasian dalam mencapai tujuan.
- 6) Tujuan koordinasi adalah tujuan bersama (*common purpose*). Kesatuan usaha/tindakan yang meminta kesadaran/pengertian kepada semua individu agar ikut serta melaksanakan tujuan bersama sebagai satu kelompok dalam mereka bekerja.

Berdasarkan keseluruhan ciri-ciri koordinasi di atas, maka pada hakikatnya koordinasi merupakan:

- 1) Fungsi yang merembes ke fungsi-fungsi manajemen lainnya.
- 2) Koordinasi adalah perwujudan dari kerja sama.
- 3) Koordinasi sangat diperlukan dalam suatu organisasi yang besar dan kompleks.⁶

c. Kebutuhan akan Koordinasi

Koordinasi diperlukan bila terdapat saling ketergantungan tugas yang tinggi. Dengan kata lain, koordinasi diperlukan bila keberhasilan seseorang, kelompok, atau divisi dalam menjalankan tugas, tergantung pada cara seseorang, kelompok atau divisi lain dalam melaksanakan tugas lain yang terkait. Ada tiga tipe utama dari saling ketergantungan tugas tersebut, yaitu:

⁶ I.G.K. Manila, *Praktek Manajemen Pemerintahan dalam Negeri*, hh. 44-45.

- 1) Saling ketergantungan yang berangkai bila satu orang, kelompok, atau divisi tidak dapat menjalankan suatu tugas sebelum orang, kelompok, atau divisi lain menjalankan tugasnya pada tahap proses produksi sebelumnya.
- 2) Ketergantungan timbal-balik terjadi bila dua atau lebih orang, kelompok, atau divisi harus berinteraksi pada saat bersamaan untuk menyelesaikan sebuah tugas.
- 3) Saling ketergantungan dalam memanfaatkan sumber daya bersama terjadi bila seseorang atau kelompok membutuhkan akses pada fasilitas bersama –sebuah gedung atau peralatan– dalam menyelesaikan tugasnya, sehingga tuntutan mereka terhadap sumber daya tersebut perlu di koordinasikan agar tidak menimbulkan penyakit.⁷

Sedangkan menurut James D. Thompson –yang dikutip T. Hani Handoko–, ada tiga macam saling ketergantungan diantara satuan-satuan organisasi, yaitu:

- 1) Saling ketergantungan yang menyatu (*pooled interdependence*) bila satuan-satuan organisasi tidak saling ketergantungan satu dengan yang lain dalam melaksanakan kegiatan harian, tetapi tergantung pada

⁷ Philip Sadler, *Mendesain Organisasi* (Jakarta: Pustaka Binaman Pressindo, 1991), hh. 44-45.

pelaksanaan kerja setiap satuan yang memuaskan untuk suatu hasil akhir.

- 2) Saling ketergantungan yang berurutan (*sequential interdependence*), dimana suatu satuan organisasi harus melakukan pekerjaannya terlebih dahulu sebelum satuan yang lain dapat bekerja.
- 3) Saling ketergantungan timbal-balik (*reciprocal interdependence*), merupakan hubungan memberi dan menerima antar satuan organisasi.⁸

d. Fungsi Koordinasi

Menurut I.G.K. Manila, pada dasarnya karakteristik fungsi koordinasi dapat diklasifikasikan menjadi lima, yaitu:

- 1) Koordinasi adalah salah satu fungsi manajemen, dengan kata lain bahwa koordinasi adalah fungsi organik dari pimpinan. Sebagai fungsi organik, pimpinan memiliki kekhasan bila dibandingkan dengan fungsi-fungsi organik lainnya. Dikatakan khas karena fungsi koordinasi mencakup pula fungsi-fungsi lainnya, seperti: perencanaan, *staffing* (pengisian jabatan), motivasi, pengawasan, dan lain sebagainya.
- 2) Koordinasi merupakan usaha untuk menjamin kelancaran mekanisme prosedur kerja dari berbagai macam komponen dalam organisasi. Kelancaran mekanisme prosedur kerja harus dengan menghindari seminimal mungkin perselisihan yang timbul antara komponen dalam

⁸ T. Hani Handoko, *Manajemen*, Edisi 2, Cet. 2 (Jakarta: BPFE, 1989), h. 196.

organisasi yang sama dan mengusahakan semaksimal mungkin kerja sama diantara komponen-komponen tersebut.

- 3) Koordinasi merupakan usaha mengarahkan dan menyatukan kegiatan-kegiatan dari satuan-satuan kerja organisasi, sehingga organisasi dapat bergerak sebagai kesatuan yang bulat untuk melaksanakan seluruh tugas organisasi yang diperlukan dalam rangka mencapai tujuannya.
- 4) Koordinasi adalah faktor dominan yang perlu diperhatikan bagi kelangsungan hidup suatu organisasi. Dikatakan sebagai faktor dominan karena kelangsungan hidup suatu organisasi pada tingkat tertentu ditentukan oleh kualitas usaha-usaha koordinasi yang di jalankan.
- 5) Koordinasi tetap memainkan peranan yang penting dalam merumuskan pembagian tugas, wewenang dan tanggung jawab.⁹

e. Manfaat Koordinasi

Pada kenyataannya, ada beberapa manfaat yang dapat diperoleh dari penerapan koordinasi pada sebuah organisasi, yakni antara lain:

- 1) Dengan koordinasi dapat dihindarkan perasaan lepas satu sama lain antara satuan-satuan organisasi atau antara para pejabat yang ada dalam organisasi.

⁹ I.GK. Manila, *Praktek Manajemen Pemerintahan dalam Negeri*, h. 46.

- 2) Dengan koordinasi dapat dihindarkan perasaan atau suatu pendapat bahwa satuan organisasinya atau jabatannya merupakan yang paling penting.
- 3) Dengan koordinasi dapat dihindarkan kemungkinan timbulnya pertentangan antar satuan organisasi atau antar pejabat.
- 4) Dengan koordinasi dapat dihindarkan timbulnya rebutan fasilitas.
- 5) Dengan koordinasi dapat dihindarkan terjadinya peristiwa waktu menunggu yang memakan waktu lama.
- 6) Dengan koordinasi dapat dihindarkan kemungkinan terjadinya kekembaran pengerjaan terhadap sesuatu aktivitas oleh satuan-satuan organisasi atau kekembaran pengerjaan terhadap tugas oleh para pejabat.
- 7) Dengan koordinasi dapat dihindarkan kemungkinan terjadinya pengerjaan terhadap sesuatu aktivitas oleh satuan-satuan organisasi atau kekosongan pengerjaan terhadap tugas oleh para pejabat.
- 8) Dengan koordinasi dapat ditumbuhkan kesadaran diantara para pejabat untuk saling bantu satu sama lain terutama diantara pejabat yang ada dalam satuan organisasi yang sama.
- 9) Dengan koordinasi dapat ditumbuhkan kesadaran diantara para pejabat untuk saling memberitahu masalah yang dihadapi bersama sehingga dapat dihindarkan kemungkinan terjadinya kebaikan bagi dirinya,

keselamatan bagi dirinya atas kerugian atau kejatuhan sesama pejabat lainnya.

- 10) Dengan koordinasi dapat di jamin kesatuan sikap antar pejabat.
- 11) Dengan koordinasi dapat di jamin adanya kesatuan kebijaksanaan antar pejabat.
- 12) Dengan koordinasi dapat di jamin adanya kesatuan langkah antar para pejabat.
- 13) Dengan koordinasi dapat di jamin adanya kesatuan tindakan antar pejabat.¹⁰

f. Pendekatan untuk Pencapaian Koordinasi yang Efektif

Menurut Dydiet Hardjito, pendekatan untuk pencapaian koordinasi yang efektif dapat ditempuh dengan dua cara, yaitu:

1) Pendekatan Potensi Koordinasi

Pendekatan potensi koordinasi ini dikaitkan dengan pendapat yang menyatakan bahwa kunci koordinasi yang efektif adalah komunikasi. Pendekatan potensi koordinasi meliputi:

- a) Sistem informasi vertikal, yaitu suatu sistem informasi dimana informasi dapat dikirimkan ke atas dan ke bawah jenjang organisasi.
- b) Sistem informasi lateral, yaitu mengabaikan komando. Hubungan lateral (hubungan ke samping atau sejajar) memungkinkan adanya

¹⁰ Sutarto, *Dasar-dasar Organisasi*, hh. 146-147.

pertukaran informasi yang dibutuhkan dapat di pertanggung jawabkan.

- c) Sistem informasi manajer penghubung, yaitu seorang manajer penghubung mempunyai wewenang formal atas semua unit yang terlibat dalam sebuah proyek. Manajer penghubung perlu dimanfaatkan apabila diperkirakan koordinasi secara efektif tidak berhasil dilaksanakan.

2) Pendekatan Struktur

Pendekatan struktur ini dilakukan apabila perusahaan merasakan adanya iklim yang tidak sehat pada unit-unit karena adanya penumpukan kegiatan/proyek pada satu unit. Pendekatan struktur ini terkenal dengan organisasi matrik. Organisasi matrik ini mencirikan adanya satuan tugas atau proyek. Satuan tugas ini dapat dibubarkan apabila proyek telah selesai.¹¹

Sementara itu, Mamduh M. Hanafi menuturkan bahwa pada hakikatnya pendekatan untuk pencapaian koordinasi yang efektif dapat ditempuh melalui tiga cara, yaitu:

1) Teknik Manajemen Dasar

Jika kebutuhan koordinasi tidak terlalu tinggi, teknik manajemen dasar dapat digunakan untuk meningkatkan koordinasi.

¹¹ Dydiat Hardjito, *Teori Organisasi dan Teknik Pengorganisasian*, hh. 54-55.

Teknik manajemen dasar ini meliputi: hirarki manajerial, prosedur dan aturan, serta rencana dan tujuan.

2) Meningkatkan Potensi Koordinasi

Jika kebutuhan koordinasi semakin meningkat atau ukuran organisasi semakin besar, teknik manajemen dasar tidak lagi cukup memadai sehingga semakin dibutuhkan koordinasi. Meningkatkan potensi koordinasi ini meliputi: sistem informasi vertikal dan hubungan horisontal.

3) Mengurangi Kebutuhan Koordinasi

Jika kebutuhan koordinasi menjadi semakin besar, metode sebelumnya tidak lagi memadai, kebutuhan akan koordinasi dapat di kurangi. Mengurangi kebutuhan koordinasi merupakan cara efektif untuk mengantisipasi kemungkinan munculnya konflik dan dengan demikian kebutuhan akan koordinasi berkurang. Mengurangi kebutuhan akan koordinasi ini meliputi: memberi tambahan sumber daya dan unit yang independen.¹²

Meskipun terdapat beberapa cara untuk mencapai koordinasi yang efektif, namun juga perlu diperhatikan sejumlah hal yang dapat mempengaruhi koordinasi yang efektif tersebut, yakni antara lain:

¹² Mamduh M. Hanafi, *Manajemen*, Cet. 1 (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 1993), hh. 277-279.

yang dimiliki bersama, bahkan dalam situasi tertentu mempunyai perasaan solidaritas.

3) Koordinasi Melalui Pedoman Kerja

Kebijaksanaan yang telah ditetapkan, baik mengenai tugas, wewenang, hubungan, tata kerja serta prosedur kerja, agar terdapat kesatuan gerak dan kesatuan tindakan, sebaiknya dituangkan dalam suatu ketentuan atau petunjuk yang sifatnya baku, seperti prosedur tetap pelaksanaan (protap) atau petunjuk pelaksanaan (juklak) atau petunjuk operasional (po).

4) Koordinasi Melalui Forum

Koordinasi melalui forum adalah penggunaan suatu wadah tertentu yang dapat dipergunakan sebagai cara untuk mengadakan tukar-menukar informasi, konsultasi, dan memecahkan suatu masalah.

5) Koordinasi Melalui Konferensi

Koordinasi semacam ini diartikan dengan sidang-sidang yang dilakukan oleh tingkat pimpinan maupun tingkat pelaksana dalam rangka pengambilan keputusan terhadap masalah yang timbul dalam pelaksanaan.¹⁴

h. Pelaksanaan Koordinasi

Dalam melaksanakan koordinasi, hendaknya sebuah organisasi memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

¹⁴ I.GK. Manila, *Praktek Manajemen Pemerintahan dalam Negeri*, hh. 51-53.

- 1) Penyederhanaan organisasi, yang dimaksud adalah bahwa perumusan organisasi yang ada harus mampu dijabarkan secara sederhana, dan mudah dipahami oleh masing-masing unit organisasi.
- 2) Terbitkan buku pedoman, yang dimaksud adalah bahwa penerbit buku pedoman pelaksanaan perumusan organisasi merupakan acuan pelaksanaan tugas dari masing-masing unit organisasi.
- 3) Peningkatan pelatihan karyawan, yaitu peningkatan pelatihan karyawan yang dilakukan oleh pihak organisasi, baik terhadap karyawan manajemen maupun karyawan non manajemen. Pelatihan ini diharapkan akan dapat meningkatkan kualitas bagi karyawan sehingga mereka akan lebih mampu beradaptasi dengan lingkungannya (termasuk pelaksanaan tugas dan koordinasinya).
- 4) Pembuatan strategi dan kebijakan, yang dimaksud adalah bahwa organisasi harus membuat suatu *master plan* (rancangan acuan) tentang kebijakan beserta cara pelaksanaannya mengenai koordinasi organisasi.
- 5) Penggunaan komunikasi, yaitu dengan penggunaan komunikasi ini diharapkan dapat terlaksana adanya komunikasi yang komunikatif diantara anggota organisasi dengan para manajer di setiap unit organisasi.

- 6) Koordinator/supervisi, yaitu pengangkatan seorang koordinator atau seorang supervisi pada hakikatnya untuk lebih membangkitkan (menggugah) suasana koordinasi yang lebih baik.
- 7) Pertemuan resmi dan tidak resmi, hal ini diadakan guna lebih memberikan kejelasan tentang pelaksanaan tugas bagi karyawan.¹⁵

2. Kelompok Bimbingan Ibadah Haji (KBIH)

Dalam eksistensinya, KBIH merupakan sebuah lembaga yang berorientasi memberikan bimbingan dan pelayanan ibadah haji kepada masyarakat yang berniat untuk menunaikan ibadah haji ke tanah suci (Makkah al-Mukarramah). Sehingga tak ayal, jika dengan keberadaannya (KBIH) masyarakat tidak lagi mengalami kesulitan dalam melaksanakan berbagai ritual yang merupakan syarat wajib maupun syarat sunnahnya haji. Berkaitan dengan tugas dan fungsi KBIH dalam upaya memberikan bimbingan dan pelayanan ibadah haji, maka berikut ini akan peneliti deskripsikan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan ibadah haji itu sendiri.

a. Pengertian Haji

Haji menurut pengertian bahasa berarti berniat pergi, bermaksud, atau menuju ke suatu tempat tertentu. Atau berniat untuk mendatangi seseorang yang dipandang mulia. Yang dimaksud dengan 'berniat' dalam pengertian ini adalah berniat untuk melakukan sesuatu yang baik di tempat

¹⁵ Indriyo Gitosudarmo dan Agus Mulyono, *Prinsip Dasar Manajemen*, Edisi 3, Cet. 4 (Yogyakarta: BPFE, 2001), hb. 150-151.

tertentu, karena tempat itu dipandang mulia atau terhormat, apabila seseorang mengunjungi orang lain yang dipandang mulia dan terhormat.

Sedangkan pengertian haji menurut istilah, sebagian ulama berpendapat bahwa haji ialah menuju ke ka'bah untuk melakukan perbuatan-perbuatan tertentu atau dengan perkataan lain bahwa haji adalah mengunjungi suatu tempat tertentu pada waktu tertentu dengan melakukan suatu pekerjaan tertentu. Yang dimaksud dengan 'mengunjungi' itu ialah mendatangi. Dan yang dimaksud dengan 'tempat tertentu' itu ialah Ka'bah dan Arofah. Sedangkan yang dimaksud dengan 'waktu tertentu' itu ialah bulan-bulan haji, yaitu: bulan Syawal, Zulqaidah, Zulhijjah, dan 10 pertama bulan Zulhijjah. Sementara itu, yang dimaksud dengan 'perbuatan tertentu' itu ialah berihram, wukuf di Arofah, mabit di Muzdalifah, mabit di Mina, melontar jumrah, mencukur, tawaf, dan sa'i.

Dari pengertian mengenai ibadah haji di atas, maka dapat disimpulkan bahwa haji harus dilakukan di tempat tertentu, pada waktu tertentu, dan dengan perbuatan-perbuatan tertentu. Ibadah haji tidak dilakukan di sembarang tempat, di sembarang waktu, dan dengan sembarang perbuatan. Apabila haji dilakukan dalam keadaan demikian, hal ini bukanlah haji.¹⁶

¹⁶ Ahmad Thib Raya dan Siti Musdah Mulia, *Menyelami Seluk-beluk Ibadah dalam Islam* (Jakarta: Kencana, 2003), hh. 227-229.

Secara historis, ibadah haji mulai diperintahkan pada akhir tahun ke-9 hijriah (sembilan setelah nabi berada di Madinah), dengan turunnya ayat yang berkaitan dengan kewajiban itu, yaitu ayat 97 surat Ali-Imran (3), yang berbunyi:

فِيهِ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ مَّقَامُ إِبْرَاهِيمَ ۖ وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا ۗ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا ۚ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ ﴿٩٧﴾

Artinya: *"Padanya terdapat tanda-tanda yang nyata, (diantaranya) maqam Ibrahim; barang siapa memasukinya (Baitullah itu) menjadi amalan dia; mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu (bagi) orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Barang siapa mengingkari (kewajiban haji), maka sesungguhnya Allah Maha Kaya (tidak memerlukan sesuatu) dari semesta alam". (Q.S. Ali-Imran: 97)*¹⁷

Perintah haji yang diturunkan pada tahun itu belum dapat dilakukan oleh Rasulullah dan kaum muslimin, karena adanya suatu halangan. Haji baru dapat dilakukan oleh nabi dan kaum muslimin setahun kemudian, yaitu tahun ke-10 hijriah. Haji inilah satu-satunya haji yang dilakukan oleh nabi.

b. Syarat-syarat Wajib Haji

Dalam rangka menunaikan ibadah haji, ada beberapa syarat wajib haji yang mesti dipenuhi oleh calon jama'ah haji. Apabila persyaratan tersebut salah satu saja tidak dapat dipenuhi, maka gugurlah kewajiban

¹⁷ Departemen Agama R.I., *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Edisi Revisi (Surabaya: Jaya Sakti, 1984), h. 92.

ritualitas hajinya. Syarat-syarat wajib haji yang mesti dipenuhi oleh calon jama'ah haji tersebut antara lain:

- 1) Beragama Islam.
- 2) Baligh.
- 3) Berakal.
- 4) Merdeka.
- 5) Memiliki perbekalan untuk pergi dan untuk yang ditinggalkan.
- 6) Ada kendaraan (bisa sampai).
- 7) Aman diperjalanan.
- 8) Memungkinkan untuk berangkat, artinya waktu dan kesempatan setelah siap bekal dan kendaraan.¹⁸

c. Rukun Haji

Di samping dituntut untuk memenuhi syarat-syarat wajib haji, seorang calon jama'ah haji mesti memperhatikan rukun-rukun haji yang merupakan komponen penting dalam pelaksanaan ibadah haji. Rukun haji tersebut ada lima macam, yaitu:

- 1) Niat.
- 2) Ihram.
- 3) Wukuf di Arafah.
- 4) Thawaf di Ka'bah.

¹⁸ Muhammad Al-Ghizz, *Fathul Qariibil Mujiib*, Terjemahan Ibnu Zuhri, Cet. 1 (Bandung: Trigenda Karya, 1995), hh. 156-157.

5) Sa'i antara Shafa – Marwah.¹⁹

d. Sunnah Haji

Sebagai pelengkap dan untuk menambah kesempurnaan dalam pelaksanaan ibadah haji, seorang calon jama'ah haji dianjurkan untuk melakukan berbagai ritualitas yang bernilai sunnah pada saat melakukan ibadah haji. Ritualitas yang merupakan sunnah haji tersebut ada tujuh macam, yaitu:

1) Melakukan Ifrad, yaitu mendahulukan ibadah haji dari pada umrah dengan melakukan ihram terlebih dahulu di tempat miqatnya. Setelah melakukan amalan-amalan haji, kemudian keluar dari Makkah menuju tanah halal yang paling dekat, sekalipun dengan satu langkah, lalu niat ihram untuk ibadah umrah serta melaksanakan segala amalan umrah. Jika seseorang tidak melakukan cara ini atau melakukan sebaliknya, maka tidak disebut ifrad.

2) Membaca Talbiyah, yaitu di sunnahkan secara terus menerus (memperbanyak bacaannya) selama ihram dan dibaca dengan keras.

Lafadz talbiyah tersebut adalah:

لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ لَبَّيْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ إِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ
لَا شَرِيكَ لَكَ

¹⁹ Abdul Fatah Idris dan Abu Ahmadi, *Fiqh Islam Lengkap* (Jakarta: Rineka Cipta, 1990), h. 119.

Artinya: *“Aku menjawab panggilan-Mu ya Allah, aku menjawab panggilan-Mu, aku menjawab panggilan-Mu, tiada sekutu bagi-Mu, aku menjawab panggilan-Mu. Sesungguhnya segala pujian, kenikmatan, dan kekuasaan hanya milik-Mu, tiada sekutu bagi-Mu”*.

- 3) Thawaf Qudum (thawaf ketika datang), yaitu thawaf yang dikhususkan bagi jama'ah haji yang baru datang memasuki Makkah sebelum wukuf di Arofah. Orang yang berthawaf karena melaksanakan umrah, berarti dia telah memenuhi syarat thawaf qudum.
- 4) Mabit di Muzdalifah, yaitu tinggal sebentar pada malam Idul Adha di Muzdalifah. Mabit di Muzdalifah ini sesuai dengan syariat yang dikemukakan oleh Imam Rafi'i. Akan tetapi, Imam Nawawi menyebutkan dalam kitab *'Raudlah dan Syarah Muhazzab'* bahwa mabit di Muzdalifah ini tidak termasuk sunnah haji, tetapi termasuk wajib haji.
- 5) Shalat dua rakaat dengan niat shalat thawaf.
- 6) Mabit di Mina, yaitu bertempat tinggal di Mina pada tanggal 11, 12 dan 13 Dzulhijjah untuk menuntaskan aktivitas melempar jumrah sampai selesai.
- 7) Thawaf Wada' (thawaf perpisahan), yaitu thawaf yang dilakukan ketika hendak keluar dari Makkah karena akan mengadakan

perjalanan, baik perjalanan haji atau bukan, perjalanan yang panjang maupun perjalanan pendek.²⁰

Sedangkan menurut Syekh 'Abdul Qadir Jailani, sunnah dalam ibadah haji ada lima belas macam, yaitu: mandi untuk ihram, untuk masuk ke Makkah, untuk wukuf di Arofah, untuk mabit di Muzdalifah, untuk melempar jumrah, untuk thawaf ziarah dan thawaf wada', kemudian thawaf qudum, ramal (berlari kecil), *idhthiba'* pada waktu thawaf, sa'i, menyentuh dua rukun, mencium hajar aswad, berjalan menaiki Shafa dan Marwah, mabit di Mina tiga hari, wukuf di Masy'arilharam, wukuf pada saat melempar jumrah, senantiasa berdzikir, berjalan pada sa'i, dan mengerjakan shalat dua rakaat sebelum thawaf.²¹

e. Hikmah Ibadah Haji

Dalam pelaksanaan ibadah haji terdapat banyak hikmah yang bisa diraih untuk kepentingan kaum muslimin seluruhnya, baik yang bersifat duniawi, maupun yang bersifat ukhrawi. Diantara hikmah yang dapat diambil dari menunaikan ibadah haji tersebut antara lain:

- 1) Di dalam ibadah haji, kaum muslimin dari segenap penjuru bumi dapat berkumpul pada suatu tempat untuk bermusyawarah mengenai kepentingan-kepentingan mereka secara umum, untuk saling bertukar

²⁰ Abdul Fatah Idris dan Abu Ahmadi, *Fiqih Islam Lengkap*, h. 122.

²¹ 'Abdul Qadir Jailani, *Fiqih Tasawuf*, Terjemahan Muhammad Abdul Ghoffar, Cet. 1 (Bandung: Pustaka Hidayah, 2001), h. 103.

pengalaman dalam merealisasikan cita-cita mereka, mewujudkan kemakmuran, kesejahteraan dan kebahagiaan lahir dan batin.

- 2) Di dalam ibadah haji, kaum muslimin dapat menyaksikan tempat-tempat suci yang merupakan saksi atas kemenangan Islam pada masa-masa lampau.
- 3) Di dalam ibadah haji, nampak dengan jelas persamaan umat manusia dalam Islam.
- 4) Ibadah haji mempunyai pengaruh yang sangat besar untuk mempersatukan kalimah Islam di seluruh dunia dan merupakan suatu kenyataan kesatuan akidah di dalam Islam yang menghimpun mereka karena cinta semata kepada Allah dan taat kepada perintah-Nya.
- 5) Ibadah haji juga merupakan latihan badaniah dan nafsiah untuk bersungguh-sungguh melaksanakan ibadah dengan disiplin dan sabar serta tawakkal, karena orang yang melaksanakan ibadah haji meninggalkan keluarga, harta benda, dan sanak saudaranya menuju ke tanah suci untuk menunaikan ibadah yang kadang-kadang ia tidak mengetahui rahasia dan hikmahnya.²²

²² Muhammadiyah Ja'far, *Tuntunan Praktis Ibadah Zakat, Puasa dan Haji*, Cet. 3 (Jakarta: Kalam Mulia, 1997), hh. 171-173.

B. Kajian Kepustakaan Penelitian

Penelitian kepustakaan (*library research*) yang secara khusus mengkaji tentang masalah yang berkaitan dengan koordinasi -menurut sepengetahuan peneliti-, belum pernah di tulis oleh para ilmuwan, praktisi, akademisi, maupun pemerhati ilmu manajemen. Bahkan kajian penelitian lapangan yang secara spesifik membahas mengenai koordinasi yang diterapkan dalam sebuah organisasi, khususnya organisasi Islam pun sangat minim keberadaannya. Berikut ini akan peneliti deskripsikan beberapa hasil penelitian lapangan yang berkaitan dengan masalah koordinasi yang telah ditulis oleh peneliti terdahulu.

1. Penelitian yang dihasilkan oleh Dewi Lutfiyah, NIM. BO4397229, dengan judul penelitian "*Sistem Koordinasi (Studi Analisa Terhadap Organisasi Kormas/Koordinasi Masjid Di Wilayah Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo)*". Rumusan masalahnya adalah: a). Bagaimana sistem koordinasi yang dilakukan oleh organisasi Kormas/Koordinasi Masjid di wilayah Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo ?. b). Bagaimana proses pelaksanaan sistem koordinasi yang dilakukan oleh Kormas/Koordinasi Masjid di wilayah Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo?. Kesimpulan yang diambil dari penelitian tersebut adalah: a). Sistem koordinasi yang ada di organisasi Kormas/Koordinasi Masjid wilayah Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo benar-benar telah dilakukan dengan melalui sistem koordinasi kewenangan, konsensus, pedoman kerja, forum, komunikasi, dan koordinasi sukarela. b). Proses pelaksanaan sistem koordinasi benar-benar telah diterapkan dengan

menjalankan program-program Kormas dengan dua macam cara, yaitu koordinasi secara vertikal dan koordinasi secara horizontal.

2. Penelitian yang dihasilkan oleh Rahayu Setianingsih, NIM. BO4300175, dengan judul penelitian "*Penerapan Fungsi Koordinasi Dalam Mewujudkan Tujuan Koperasi Karyawan RSI Siti Hajar Sidoarjo*". Rumusan masalahnya adalah: a). Siapakah koordinator yang bertugas mengkoordinir kegiatan unit-unit koperasi yang dijalankan (simpan pinjam dan konsumsi) ?. b). Usaha-usaha apa yang dijalankan untuk menerapkan fungsi koordinasi dalam mewujudkan tujuan koperasi karyawan RSI Siti Hajar Sidoarjo?. Kesimpulan yang diambil dari penelitian tersebut adalah: a). Koordinator yang bertugas mengkoordinir kegiatan unit-unit yang dijalankan (simpan pinjam dan konsumsi) adalah dengan mengangkat kelompok kerja (*team work*) di bawah pimpinan ketua pengurus untuk mengkoordinir kegiatan unit-unit yang terkait. Kelompok kerja ini terdiri dari pengurus unit simpan pinjam dan pengurus unit pertokoan. b). Usaha-usaha yang dijalankan untuk menerapkan fungsi koordinasi dalam mewujudkan tujuan koperasi karyawan RSI Siti Hajar Sidoarjo adalah sebagai berikut: mengadakan pertemuan-pertemuan yang diadakan antara ketua pengurus dan badan pengawas; antara ketua pengurus dengan pengurus; antara para pengurus inti dengan unit pelaksana/karyawan koperasi; dan antara semua unsur yang ada (rapat anggota); membuat buku pedoman, yaitu untuk unit pertokoan, koordinasi dengan prinsip kesatuan komando, dan melakukan komunikasi sebagai saran dalam koordinasi.

3. Penelitian yang dihasilkan oleh Luluk Mushonnifah, NIM. BO4397002, dengan judul penelitian "Manajemen Penyelenggaraan Haji (Studi Tentang Fungsi Koordinator Dalam Penyelenggaraan Haji Di Departemen Agama Kabupaten Sidoarjo)". Rumusan masalahnya adalah bagaimana koordinasi penyelenggaraan haji di Departemen Agama Kabupaten Sidoarjo ?. Kesimpulan yang diambil dari penelitian tersebut adalah: a). Koordinasi intern dilakukan antara Departemen Agama Kabupaten Sidoarjo melalui beberapa bidang dan kepanitiaan yang dibuat dengan cara merancang dan menyusun beberapa agenda penyelenggaraan haji, khususnya dalam pembagian wilayah kerja secara komprehensif. b). Koordinasi ekstern yang dilakukan oleh Departemen Agama Kabupaten Sidoarjo dengan lembaga-lembaga (departemen-departemen) terkait yang tujuannya adalah untuk mempermudah proses penyelenggaraan ibadah haji itu sendiri. Koordinasi ekstern ini dilakukan pada tahap awal yang menyangkut pendaftaran calon jamaah haji yang di koordinasikan dengan Bank yang telah ditunjuk oleh pemerintah atau pemeriksaan kesehatan dengan Departemen Kesehatan/Puskesmas.

Dari beragam hasil penelitian lapangan yang dihasilkan oleh para peneliti terdahulu di atas, yakni mengenai fungsi koordinasi yang diterapkan di dalam sebuah lembaga atau organisasi keislaman, maka terlihat dengan jelas adanya titik perbedaan dengan penelitian yang peneliti kaji ini, yakni mengenai "*Studi Tentang Fungsi Koordinasi Dalam Kelompok Bimbingan Ibadah Haji Amanat Bangsa*". Meski sama-sama mengkaji mengenai masalah yang berkaitan dengan

penerapan fungsi koordinasi dalam sebuah organisasi Islam, namun perbedaan lokasi penelitian, fokus kajian yang dibahas, maupun deskripsi lokasi penelitian yang menekankan adanya poros perbedaan tersebut. Oleh karenanya, penelitian ini sengaja di desain untuk mengisi 'ruang hampa' dalam literatur ilmiah dan menambah kekayaan informasi dalam dunia akademisi yang berkaitan dengan koordinasi pada sebuah organisasi Islam.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan kualitatif. Asumsi dasar peneliti menggunakan pendekatan kualitatif adalah peneliti ingin mengetahui secara mendalam tentang bagaimana koordinasi yang diterapkan oleh KBIH Amanat Bangsa dan faktor apa saja yang mendukung dan menghambat proses koordinasi tersebut. Pada hakikatnya penelitian dengan menggunakan pendekatan kualitatif lebih menekankan analisisnya pada proses penyimpulan deduktif dan induktif serta pada analisis terhadap dinamika hubungan antar fenomena yang diamati, dengan menggunakan logika ilmiah.¹ Di samping itu, pendekatan kualitatif sengaja peneliti gunakan dengan alasan bahwa temuan-temuan dalam penelitian kualitatif tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau bentuk hitungan lainnya. Contoh penelitian kualitatif dapat berupa penelitian tentang kehidupan, riwayat, perilaku seseorang, tentang peranan organisasi, pergerakan sosial, atau hubungan timbal balik.²

¹ Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, Edisi 1, Cet. 3 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001) h. 5.

² Anselm Strauss & Juliet Corbin, *Dasar-dasar Penelitian Kualitatif*, Terjemahan Muhammad Shodiq & Imam Muttaqien, Cet. 1 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), h. 4.

Sedangkan jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian deskriptif. Asumsi peneliti menggunakan jenis penelitian deskriptif dalam penelitian ini dikarenakan peneliti ingin menggambarkan mengenai obyek penelitian yang dijadikan bahan pembahasan dalam penelitian ini, khususnya mengenai koordinasi yang diterapkan oleh KBIH Amanat Bangsa dan faktor pendukung maupun penghambat proses koordinasi di KBIH Amanat Bangsa. Bukan hanya itu, dengan menggunakan jenis penelitian deskriptif ini, peneliti ingin menggambarkan tentang *company profile* (profil organisasi) KBIH Amanat Bangsa, baik meliputi latar belakang berdirinya, visi dan misinya, program-program kerjanya, maupun berbagai hal yang terdapat dalam KBIH Amanat Bangsa yang layak disajikan dalam penelitian ini.

B. Wilayah Penelitian

Wilayah penelitian yang dijadikan obyek kajian dalam penelitian ini yaitu lembaga yang bergerak dalam bidang pelayanan maupun bimbingan ibadah haji dan umrah, yakni KBIH Amanat Bangsa yang berlokasi di Jl. Siwalankerto Utara No. 56 Surabaya. Fokus kajian yang dibahas adalah mengenai koordinasi yang diterapkan oleh KBIH Amanat Bangsa dan faktor pendukung maupun penghambat proses koordinasi di KBIH Amanat Bangsa.

C. Jenis dan Sumber Data

Dalam sebuah penelitian, jenis dan sumber data dibagi menjadi dua macam, yakni data primer (data pokok/utama) dan data sekunder (data pelengkap/pendukung). Data primer yang dimaksud dalam penelitian ini adalah data yang mampu menjawab permasalahan yang dirumuskan dalam penelitian ini, yakni data mengenai koordinasi yang diterapkan oleh KBIH Amanat Bangsa dan faktor pendukung maupun penghambat proses koordinasi di KBIH Amanat Bangsa. Sedangkan data sekunder yang akan peneliti sajikan dalam penelitian ini adalah data mengenai *company profile* (profil organisasi) KBIH Amanat Bangsa. Misalnya data tentang latar belakang berdirinya KBIH Amanat Bangsa, visi dan misi KBIH Amanat Bangsa, program-program kerja KBIH Amanat Bangsa, dan berbagai data sekunder lainnya yang berfungsi sebagai penyempurna dalam penyajian hasil penelitian ini.

Sedangkan dalam kaitannya dengan upaya penggalian data, maka sumber data primer akan peneliti gali dari informan utama, yakni Bapak Asep Syaifuddin Chalim, selaku ketua KBIH Amanat Bangsa, dengan pertimbangan bahwa beliau adalah yang peneliti anggap paling mengetahui tentang seluk beluk yang terdapat dalam organisasi yang dipimpinnya. Sedangkan mengenai penggalian data sekunder, di samping peneliti gali dari ketua KBIH Amanat Bangsa, peneliti juga melakukan penggalian data kepada pengurus KBIH Amanat Bangsa yang lainnya, seperti: sekretaris KBIH Amanat Bangsa, Kabag. Administrasi KBIH Amanat Bangsa, maupun pengurus KBIH Amanat Bangsa yang lainnya, dan

yang lainnya, dan semua itu peneliti lakukan dengan cara melakukan wawancara, meminta dokumentasi maupun mengadakan pengamatan secara langsung.

D. Tahap-tahap Penelitian

Dengan mengadopsi tahap-tahap penelitian yang dirumuskan oleh Lexy J. Moleong, maka berikut ini akan peneliti deskripsikan tahap-tahap penelitian tersebut yang telah peneliti kontekstualisasikan dengan apa yang pernah peneliti jalani di lapangan. Tahap-tahap penelitian tersebut antara lain:

1. Tahap Pralapangan

Yaitu tahap yang dilakukan sebelum melakukan penelitian. Pada tahap ini dapat diuraikan sebagai berikut :

a. Menyusun Rancangan Penelitian³

Dalam hal ini, peneliti terlebih dahulu membuat permasalahan yang akan dijadikan obyek penelitian, untuk kemudian membuat matrik usulan judul penelitian sebelum melaksanakan penelitian hingga membuat proposal penelitian.

b. Memilih Lapangan Penelitian

Cara terbaik yang perlu di tempuh dalam penentuan lapangan penelitian ialah dengan jalan mempertimbangkan teori substantif, pergilah

³ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Cet. 17 (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002), h. 86.

dan jajakilah lapangan untuk melihat apakah terdapat kesesuaian dengan kenyataan yang berada di lapangan.⁴

Dalam hal ini, yang dilakukan peneliti adalah sebelum membuat usulan pengajuan judul penelitian, peneliti terlebih dahulu telah menggali data atau informasi tentang obyek yang akan diteliti (meski secara informal), kemudian timbul ketertarikan pada diri peneliti untuk menjadikannya sebagai obyek penelitian, karena dirasa sesuai dengan disiplin keilmuan yang peneliti tekuni dan dapati selama ini.

c. Mengurus Perizinan

Setelah membuat usulan penelitian dalam bentuk proposal, peneliti mengurus izin bagi pelaksanaan penelitian. Tentu saja peneliti tidak mengabaikan izin meninggalkan tugas, yang pertama-tama perlu dimintakan dari atasan peneliti sendiri, ketua jurusan, dekan fakultas, kepala instansi seperti pusat, dan lain-lain.⁵

Dalam hal ini, sebelum melakukan penelitian (secara formal), peneliti terlebih dahulu meminta surat izin penelitian kepada dekan fakultas untuk kemudian diserahkan kepada pimpinan organisasi yang diteliti, yaitu Bapak Drs. K.H. Asep Syaifuddin Chalim, M.A., selaku ketua KBIH Amanat Bangsa.

⁴ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, h. 86.

⁵ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, h. 87.

d. Menyiapkan Perlengkapan Penelitian

Peneliti hendaknya menyiapkan tidak hanya perlengkapan fisik, tetapi segala macam perlengkapan penelitian yang diperlukan.⁶

Dalam hal ini, dalam upaya mengumpulkan data atau informasi dari obyek yang diteliti, peneliti menggunakan alat bantu berupa buku dan alat tulis untuk mencatat hasil wawancara antara peneliti dengan informan, walau dirasa masih sangat kurang dan sederhana.

2. Tahap Pekerjaan Lapangan

Uraian tentang tahap pekerjaan lapangan dibagi atas tiga bagian. Namun dalam penelitian ini, peneliti hanya menggunakan 2 bagian dalam tahap pekerjaan lapangan, yaitu: 1). Memahami latar penelitian dan persiapan diri, dan 2). Memasuki lapangan.⁷

Dalam tahap ini, sebelum merumuskan pembahasan penelitian, peneliti terlebih dahulu telah memahami tentang latar penelitian, kemudian peneliti mempersiapkan diri secara matang dan serius untuk membahas penelitian ini. Baru kemudian peneliti terjun ke lapangan untuk mencari data atau informasi yang berkaitan dengan masalah yang dijadikan fokus penelitian.

⁶ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, h. 91.

⁷ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, h. 94.

3. Tahap Analisis Data

Analisis data menurut Patton –yang dikutip Moleong– adalah proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya ke dalam suatu pola, kategori, dan satuan uraian dasar.⁸

Dalam tahap ini, setelah peneliti berhasil mendapatkan data atau informasi dari obyek yang diteliti, maka langkah yang diambil kemudian yaitu memilah-milah data yang peneliti anggap penting untuk disajikan dalam penelitian ini dan kemudian menyajikannya secara utuh tanpa melakukan pengurangan ataupun penambahan data atau informasi yang diberikan oleh informan di lapangan.

E. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah suatu proses pengadaan data primer untuk keperluan penelitian. Pengumpulan data merupakan langkah yang amat penting dalam metode ilmiah, karena pada umumnya data yang dikumpulkan digunakan untuk menguji hipotesa yang telah dirumuskan.⁹ Ada berbagai macam teknik pengumpulan data dalam proses penelitian, tetapi teknik pengumpulan data yang peneliti gunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

⁸ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, h. 103.

⁹ Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, Cet. IV (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1999), h. 211.

1. Metode Wawancara (*Interview*)

Wawancara atau *interview* adalah suatu bentuk komunikasi verbal, yaitu semacam percakapan yang bertujuan memperoleh informasi. Dalam wawancara, pertanyaan dan jawaban diberikan secara verbal. Biasanya komunikasi ini dilakukan dalam keadaan saling berhadapan, namun komunikasi dapat juga dilaksanakan melalui telepon. Sering wawancara atau *interview* dilakukan antara dua orang, tetapi dapat juga sekaligus di *interview* dua orang atau lebih.¹⁰ Dalam metode wawancara ini, peneliti menggunakan bentuk "*semi structured*", artinya mula-mula peneliti (*interviewer*) menanyakan sederetan pertanyaan yang sudah terstruktur, kemudian satu-persatu diperdalam dalam mengorek keterangan lebih lanjut. Dengan demikian jawaban yang diperoleh bisa meliputi semua variabel, dengan keterangan yang lengkap dan mendalam.¹¹

Dengan menggunakan metode wawancara ini, peneliti mendapatkan data tentang:

- a. Latar belakang berdirinya KBIH Amanat Bangsa.
- b. Visi dan misi KBIH Amanat Bangsa.
- c. Program-program kerja yang dimiliki oleh KBIH Amanat Bangsa.
- d. Koordinasi yang diterapkan oleh KBIH Amanat Bangsa.

¹⁰ S. Nasution, *Metode Research*, Edisi 1 (Bandung: Jemmars, 1982), h. 131.

¹¹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Edisi Revisi IV, Cet. 11 (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), hh. 231-232.

- e. Faktor pendukung dan penghambat proses koordinasi di KBIH Amanat Bangsa.
- f. Serta berbagai informasi lainnya yang berkaitan dengan masalah yang dijadikan fokus permasalahan dalam penelitian ini.

2. Metode Pengamatan (*Observasi*)

Pengamatan (*observasi*) adalah alat pengumpul data yang dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematis gejala-gejala yang diselidiki.¹² Observasi dilakukan bila belum banyak keterangan yang dimiliki tentang masalah yang diselidiki. Dari hasil observasi, dapat diperoleh gambaran yang lebih jelas tentang masalahnya dan mungkin petunjuk-petunjuk tentang cara memecahkannya.¹³

Dengan menggunakan metode observasi ini, peneliti mendapatkan data atau informasi tentang:

- a. Lokasi KBIH Amanat Bangsa.
- b. Fasilitas yang dimiliki dan digunakan oleh pengurus KBIH Amanat Bangsa dalam upaya menjalankan visi dan misi organisasinya.
- c. Program kerja yang dilaksanakan oleh pengurus KBIH Amanat Bangsa dalam rangka memberikan pelayanan dan bimbingan ibadah haji bagi para jama'ahnya.

¹² Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, Cet. 1 (Jakarta: Bumi Aksara, 1997), h. 70.

¹³ S. Nasution, *Metode Research*, h. 122.

- d. Maupun berbagai pengamatan lainnya yang berfungsi sebagai penyempurna hasil penelitian ini.

3. Metode Dokumentasi

Metode dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, legger, agenda, dan sebagainya.¹⁴

Dengan menggunakan metode dokumentasi ini, peneliti mendapatkan dokumen berupa:

- a. *Company profile* (profil organisasi) KBIH Amanat Bangsa dalam bentuk brosur.
- b. Struktur kepengurusan KBIH Amanat Bangsa.
- c. Daftar kegiatan bagi para jama'ah haji yang bergabung di KBIH Amanat Bangsa.

F. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah menguraikan atau memecahkan suatu keseluruhan menjadi bagian-bagian atau komponen-komponen yang lebih kecil, agar dapat:

1. Mengetahui komponen yang menonjol (memiliki nilai ekstrim).
2. Membandingkan antara komponen yang satu dengan komponen lainnya (dengan menggunakan angka selisih atau angka rasio).

¹⁴ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, h. 236.

3. Membandingkan salah satu atau beberapa komponen dengan keseluruhan (secara persentase).¹⁵

Dalam penelitian ini, analisis data yang peneliti gunakan adalah analisis domain (*domain analysis*). Artinya analisis hasil penelitian ini hanya ditargetkan untuk memperoleh gambaran seutuhnya dari obyek yang diteliti, tanpa harus diperincikan secara detail unsur-unsur yang ada dalam keutuhan obyek penelitian tersebut.¹⁶

G. Teknik Keabsahan Data

Ada beberapa teknik keabsahan data yang dirumuskan oleh Lexy J. Moleong dalam bukunya yang berjudul "*Metodologi Penelitian Kualitatif*", namun dalam penelitian ini, peneliti tidak mengadopsi secara keseluruhan teknik keabsahan data yang dikemukakan tersebut, tetapi peneliti sengaja memilih teknik keabsahan data yang sesuai dengan konteks penelitian dan pernah dilakukan oleh peneliti dalam rangka penyempurnaan hasil penelitian ini.

Berikut ini akan peneliti jelaskan mengenai teknik keabsahan data yang peneliti gunakan dalam pembahasan penelitian ini, yaitu antara lain:

¹⁵ M. Iqbal Hasan, *Pokok-pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, Cet. 1 (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002), h. 97.

¹⁶ Burhan Bungin, *Analisis Data Penelitian Kualitatif : Pemahaman Filosofis dan Metodologis Ke Arah Penguasaan Model Aplikasi*, Edisi 1, Cet. 3 (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), h. 85.

1. Ketekunan Pengamatan

Ketekunan pengamatan dilakukan dengan maksud menemukan ciri-ciri dan unsur-unsur dalam situasi yang relevan dengan persoalan atau isu yang sedang dicari dan kemudian memusatkan diri pada hal-hal tersebut secara rinci.¹⁷

Dalam hal ini, sebelum mengambil pembahasan penelitian, peneliti telah melakukan pengamatan terlebih dahulu dalam upaya menggali data atau informasi untuk dijadikan obyek penelitian, yang pada akhirnya peneliti menemukan permasalahan yang menarik untuk dibedah, yaitu masalah yang berkaitan dengan koordinasi yang diterapkan di KBIH Amanat Bangsa dan faktor pendukung maupun penghambat proses koordinasi di KBIH Amanat Bangsa.

2. Triangulasi

Triangulasi adalah mencocokkan (*cross check*) antara hasil wawancara, atau observasi dengan bukti dokumen, atau pendapat yang lain.¹⁸ Dengan kata lain triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu. Denzin –yang dikutip Moleong–, membedakan empat macam triangulasi sebagai teknik pemeriksaan yang memanfaatkan penggunaan sumber, metode, penyidik dan teori.¹⁹

¹⁷ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, h. 177.

¹⁸ Boy S. Sabarguna, *Analisis Data Pada Penelitian Kualitatif*, Cet. 1 (Jakarta: UI Press, 2005), h. 65.

¹⁹ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, h. 178.

Dalam hal ini, upaya yang dilakukan oleh peneliti dalam pengecekan data yaitu dengan menggunakan sumber data dalam penggaliannya, baik itu sumber data primer yang berupa hasil wawancara maupun sumber data sekunder yang berupa buku dan dokumen yang peneliti peroleh dari KBIH Amanat Bangsa. Sedangkan metode atau cara yang peneliti gunakan dalam pemeriksaan keabsahan data yaitu dengan menggunakan metode analisis domain. Artinya setelah data berhasil dikumpulkan, kemudian peneliti menyajikannya secara utuh tanpa melakukan pengurangan maupun penambahan data dalam penyajiannya. Dan sebelum hasil penelitian ini diujikan, terlebih dahulu peneliti menyerahkan hasil penelitiannya kepada informan utama dari obyek yang diteliti, yakni Bapak Drs. K.H. Asep Syaifuddin Chalim, M.A., selaku ketua KBIH Amanat Bangsa, dengan tujuan agar hasil penelitian ini nantinya benar-benar dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya, dalam artian tidak ada penipuan informasi atau data yang telah dikumpulkan.

3. Pemeriksaan Teman Sejawat melalui Diskusi

Teknik ini dilakukan dengan cara mengekspos hasil sementara atau hasil akhir yang diperoleh dalam bentuk diskusi analitik dengan rekan-rekan sejawat.²⁰

Dalam hal ini, sebagai upaya sosialisasi dan penyempurnaan hasil penelitian, peneliti telah melakukan diskusi dengan rekan sejawat yang telah di format dan dikoordinir oleh Ketua Laboratorium Jurusan Manajemen

²⁰ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, h. 179.

Dakwah (MD), yang biasa disebut dengan ujian proposal penelitian (skripsi) yang dihadiri oleh rekan-rekan sejawat (rekan seangkatan), serta di dampingi oleh dosen penguji proposal penelitian. Hal ini dilakukan dengan maksud agar hasil penelitian ini nantinya dapat menjadi lebih baik.

BAB IV

DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN

A. Letak Geografis KBIH Amanat Bangsa

Kelompok Bimbingan Ibadah Haji (selanjutnya disingkat KBIH) Amanat Bangsa yang berlokasi di Jl. Siwalankerto Utara No. 56 Surabaya, secara geografis terletak di bagian selatan kota Surabaya dengan batasan-batasan wilayahnya yang terdiri dari:¹

- Sebelah Utara : Kelurahan Jemur Ngawinan
- Sebelah Selatan : Kelurahan Gayungan
- Sebelah Barat : Kelurahan Gayungan
- Sebelah Timur : Kelurahan Kutisari

B. Sejarah Berdirinya KBIH Amanat Bangsa

KBIH Amanat Bangsa didirikan tepatnya pada tahun 1995 dengan mendapatkan surat izin operasional SK MENAG RI No. 471/1995 oleh Asep Saifuddin Chalim. Menurut penuturan Bapak Asep Saifuddin Chalim, bahwa tujuan utama didirikannya KBIH Amanat Bangsa ini adalah untuk memberikan bimbingan kepada calon jamaah haji dan jamaah umrah mulai dari tanah air

¹ Hasil wawancara dengan Bapak Asep Saifuddin Chalim (Ketua KBIH Amanat Bangsa), pada tanggal 8 Agustus 2005.

(Indonesia) sampai dengan selama di tanah suci Makkah dan Madinah. Tujuan tersebut sejalan dengan visi yang dimiliki oleh KBIH Amanat Bangsa, yakni mengupayakan jama'ah memperoleh haji yang mabrur, ibadahnya secara maksimal, dan ziarah di tempat yang bersejarah secara maksimal dengan biaya yang tidak mahal. Untuk memudahkan pencapaian visi tersebut, pihak pengurus KBIH Amanat Bangsa telah merumuskan beberapa misi, yang terdiri dari: *pertama*, untuk mewujudkan haji yang mabrur, dari segi manasiknya semakin benar, dan uang yang halal. *Kedua*, untuk meningkatkan ibadah secara maksimal, yakni dengan cara memperhatikan shalat para jama'ah, rukun, wajib, dan sunnah haji. Dan *ketiga*, berupaya memperbanyak wawasan dari tempat bersejarah dan mengambil hikmahnya serta pengetahuan yang lainnya.

Berkaitan dengan eksistensi KBIH Amanat Bangsa, terdapat sisi historis yang melatar belakangi berdirinya KBIH ini. Penyebab yang melatar belakangi pengurus KBIH Amanat Bangsa untuk mendirikan sebuah organisasi yang bergerak dalam bidang pemberian bimbingan ibadah haji dan umrah ini diawali karena adanya fenomena yang mendera para jamaah ketika menunaikan ibadah haji maupun umrah di Makkah maupun Madinah. Diantara beberapa keprihatinan yang dirasakan oleh para jamaah haji maupun umrah ketika berada di Makkah maupun Madinah yang memicu pengurus KBIH Amanat Bangsa untuk mendirikan KBIH ini adalah:

1. Banyak jama'ah haji yang melaksanakan ibadah haji dengan tidak mantap karena tidak bisa menggambarkan urutan manasik haji.

2. Banyak jama'ah haji yang merasa tidak mantap dalam melaksanakan ibadah haji karena tidak mendapatkan bimbingan secara langsung dari pembimbing yang diyakini kebenaran manasiknya.
3. Banyak jama'ah haji yang berusia lanjut tersesat, kemudian kelelahan, kepanasan dan merasakan kecemasan. Sehingga seringkali ketersesatan tersebut menjadi salah satu penyebab kematian.
4. Karena jama'ah haji tidak bisa menyaksikan penyembelihan ternak dari *damnya* (dendanya), seringkali menyebabkan keraguan dalam beribadah.
5. Tempat-tempat ziarah yang akan dijadikan obyek tafakkur dalam rangka meningkatkan keimanan, karena tidak adanya pembimbing maka tidak bisa dikunjungi.
6. Banyak jama'ah haji yang terjebak dalam kesulitan ketika melempar jumrah, karena tidak bisa mengantisipasi waktu yang sah dan aman.
7. Ibadah haji yang mungkin saja hanya sekali dilaksanakan oleh calon jama'ah haji selama hidupnya hendaknya mendapatkan kemantapan, keyakinan dan pengalaman yang memuaskan.
8. Banyak jama'ah haji karena kondisi kesehatan, thawaf dan sa'inya menggunakan *arobah* (kursi dorong) dengan membayar 100 real sampai 300 real, padahal seharusnya tidak harus membayar.
9. Harapan jama'ah haji kalau meninggal di tanah haram bisa di shalatkan di Masjidil Haram atau Masjid Nabawi kemudian di makamkan di Ma'la atau Baqi', hal tersebut sedikit sekali yang dapat terlaksana.



10. Melempar jumrah aqabah pada tanggal 10 Dzulhijjah dan melempar *jamarat* yang sempurna (ba'da zawal) adalah manasik haji yang paling sulit pengerjaannya, tetapi akan menjadi mudah apabila dibimbing oleh pembimbing yang berpengalaman.
11. Karena tidak adanya pembimbing, uang kembali yang berjumlah \pm 1500 Real akan bernilai sangat kecil, tetapi karena faktor pembimbing, bisa memiliki nilai yang sangat besar.
12. Guna memperoleh keyakinan atas kesempurnaan manasik haji, jama'ah haji perlu memahami teori, dan pelaksanaannya mendapat bimbingan dari para pembimbing haji yang bertanggung jawab.

Dengan melihat beberapa fenomena tersebut di atas, maka pimpinan Pondok Pesantren Amanatul Ummah, yakni Bapak Asep Saifuddin Chalim memutuskan untuk memberikan pelayanan kepada para jama'ah haji maupun umrah dengan mekanisme menyediakan 1 orang pembimbing untuk 50 orang jama'ah haji atau umrah. Dengan memberikan pelayanan tersebut, beliau berharap agar supaya para jama'ah yang menunaikan ibadah haji maupun umrah tidak mengalami kesulitan dalam melakukan berbagai ritual sebagai syarat sahnya ibadah haji maupun umrah. Di samping itu, agar para jama'ah haji maupun umrah dapat menjalankan ibadah haji maupun umrahnya dengan khusyu', dan

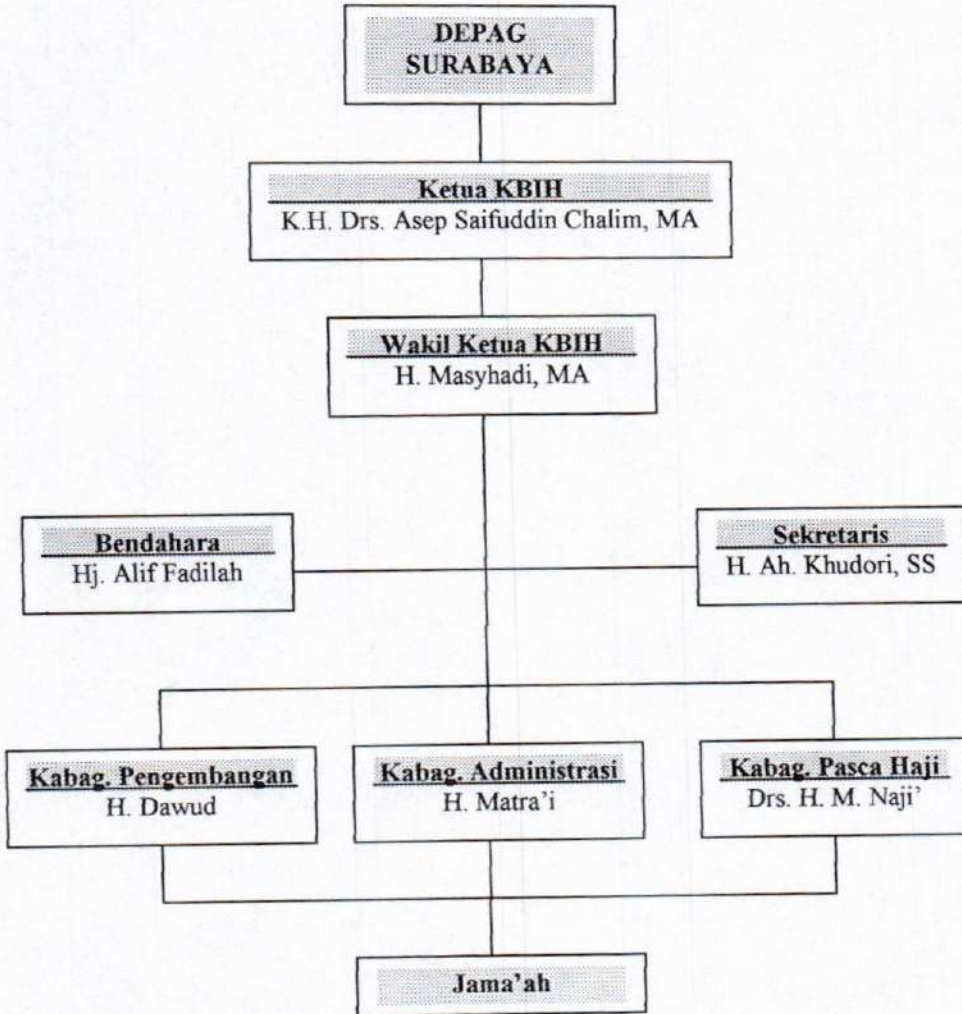
diharapkan sepulangnya ke tanah air mampu mendapatkan predikat haji "mabrur" dalam pandangan Allah SWT.²

C. Struktur Kepengurusan di KBIH Amanat Bangsa

Sebagai sebuah lembaga yang profesional, KBIH Amanat Bangsa memiliki struktur kepengurusan yang permanen, selama belum terjadi suksesi kepengurusan. Struktur kepengurusan tersebut sengaja disusun guna kejelasan posisi, kedudukan, dan tanggung jawab dari masing-masing pengurus. Di samping itu, juga untuk mencegah terjadinya *over lapping* (tumpang tindih) dalam pelaksanaan tugas antar masing-masing pengurus KBIH Amanat Bangsa. Berikut ini akan peneliti deskripsikan bagan susunan kepengurusan yang terdapat di KBIH Amanat Bangsa, yakni sebagai berikut:

² Hasil wawancara dengan Bapak Asep Saifuddin Chalim (Ketua KBIH Amanat Bangsa), pada tanggal 8 Agustus 2005. Dan juga di sarikan dari profil KBIH Amanat Bangsa dalam bentuk

Struktur Organisasi KBIH Amanat Bangsa Surabaya³



³ Data di atas di adopsi dari dokumentasi KBIH Amanat Bangsa.

D. Program-program Kerja KBIH Amanat Bangsa

Upaya mewujudkan eksistensi KBIH Amanat Bangsa, tidak hanya dilakukan dalam bentuk menyusun personalia (susunan kepengurusan) saja, tetapi juga dimanifestasikan dalam wujud menyusun berbagai program kerja yang pada hakikatnya bertujuan untuk memberikan pelayanan dan bimbingan yang terbaik bagi calon jama'ah haji yang bergabung di KBIH Amanat Bangsa. Beberapa program kerja tersebut antara lain:⁴

1. Membantu memberikan pengarahan dan bimbingan kepada mereka yang memerlukan pada proses pendaftaran guna perolehan kuota.
2. Menyebarkan brosur terlampir kepada para calon jama'ah haji yang telah memperoleh kuota.
3. Menetapkan biaya tambahan untuk manasik haji.
4. Melaksanakan manasik haji.
5. Mengelompokkan para calon jama'ah haji untuk mengikuti bimbingan ke tanah suci ke dalam rombongan dan regu, agar mereka terbiasa berkomunikasi sesama calon jama'ah haji sejak di tanah air.
6. Senantiasa memberikan pengarahan dan bimbingan kepada para jama'ah untuk berziarah ke tempat-tempat bersejarah, baik di Makkah, Madinah, maupun di Jeddah.

⁴ Hasil wawancara dengan Bapak Masyhadi (Wakil Ketua KBIH Amanat Bangsa), pada tanggal 15 Agustus 2005.

7. Senantiasa memantau kesehatan para jama'ah, terutama bagi mereka yang beresiko tinggi.
8. Mengadakan tanya jawab dan evaluasi setelah pelaksanaan tiap-tiap ibadah.

E. Mekanisme Perekrutan Calon Jama'ah Haji di KBIH Amanat Bangsa

Dalam perjalanannya sebagai sebuah organisasi yang bergerak dalam bidang pelayanan bimbingan ibadah haji, KBIH Amanat Bangsa sudah pernah merasakan pahit dan manisnya berjihad di jalan Allah. Salah satu bentuk misi mulia tersebut yakni dalam hal menarik simpati anggota masyarakat yang ingin menunaikan ibadah haji. Pada awal berdirinya, para pengurus KBIH Amanat Bangsa secara bahu-membahu mengajak anggota masyarakat yang dirasa memiliki kelebihan harta untuk menunaikan ibadah haji. Hal itu dilakukan oleh pengurus dengan cara mendatangi mereka dari rumah ke rumah (*door to door*). Dalam mengunjungi rumah-rumah orang yang dianggap memiliki kelebihan harta tersebut, pengurus KBIH Amanat Bangsa memberikan brosur dan sekaligus memberikan penjelasan dalam bentuk lisan mengenai kemudahan-kemudahan yang diberikan oleh KBIH Amanat Bangsa dalam hal pelaksanaan ibadah haji.

Namun seiring dengan berjalannya waktu –berkat ridha Allah SWT–, akhirnya mekanisme perekrutan calon jama'ah haji yang dilakukan dari rumah ke rumah mulai ditinggalkan. Hal itu dikarenakan jama'ah yang bergabung di KBIH Amanat Bangsa sudah mengetahui keberadaan KBIH ini dari mulut ke mulut, dengan kata lain mereka mendapatkan informasi dari orang yang pernah menjadi jama'ah haji di KBIH Amanat Bangsa. Hal ini tentunya dirasakan sebagai hal yang membahagiakan oleh para pengurus KBIH Amanat Bangsa, karena mereka

tidak perlu bersusah payah lagi untuk merekrut para calon jama'ah haji untuk bergabung di KBIH Amanat Bangsa. Untuk mengetahui secara pasti jumlah jama'ah haji yang telah bergabung di KBIH Amanat Bangsa sebagai perwujudan kerja keras para pengurus, berikut ini akan peneliti paparkan dalam bentuk tabel jumlah jama'ah haji yang bergabung di KBIH Amanat Bangsa mulai tahun 1996 – 2006.

Tabel. 1
Kondisi Perkembangan Perolehan Jama'ah Haji di KBIH Amanat Bangsa
Peserta Bimbingan Tahun 1996 – 2006⁵

Tahun	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1996	25	25	50
1997	54	44	98
1998	69	71	140
1999	25	25	50
2000	53	47	100
2001	156	204	360
2002	80	100	180
2003	100	115	215
2004	174	182	356
2005	79	94	173
2006	127	154	281
Jumlah Keseluruhan	942	1061	2003

⁵ Data di atas di sarikan dari dokumentasi KBIH Amanat Bangsa.

Dari keterangan tabel di atas, terlihat jelas bahwa perolehan jumlah jama'ah haji yang bergabung di KBIH Amanat Bangsa mengalami kemajuan yang sangat pesat, dari mulai awal berdirinya hingga sekarang. Meski tidak bersifat stabil –naik turun dalam hal jumlah perolehan jama'ah haji–, namun secara akumulasi pertumbuhan perolehan jama'ah haji yang bergabung di KBIH Amanat Bangsa dapat dikatakan sangat menggembirakan. Berkaitan dengan calon jama'ah haji yang bergabung di KBIH Amanat Bangsa untuk masa pemberangkatan tahun 2006 –dengan jumlah calon jamaah haji laki-laki sebanyak 127 orang dan calon jama'ah haji perempuan sebanyak 154 orang dengan jumlah keseluruhan sebanyak 281 orang– sengaja peneliti tampilkan karena menurut pengurus KBIH Amanat Bangsa, jumlah tersebut adalah mereka yang sudah mendaftar sebagai calon jama'ah haji di KBIH Amanat Bangsa untuk masa pemberangkatan tahun 2006, meski tidak bisa dipastikan jumlahnya –bisa jadi berjumlah tetap, menurun, atau bahkan bertambah–.⁵

F. Beberapa Persyaratan Menjadi Calon Jama'ah Haji di KBIH Amanat Bangsa

Dalam hal perekrutan calon jama'ah haji, pengurus KBIH Amanat Bangsa telah menyusun beberapa persyaratan yang mesti dipenuhi oleh calon jama'ah haji yang ingin bergabung di KBIH ini. Hal ini dilakukan dengan maksud

⁵ Hasil wawancara dengan Bapak H. Matra'i (Kabag Administrasi KBIH Amanat Bangsa), pada tanggal 18 Agustus 2005. Dan juga di sarikan dari dokumentasi KBIH Amanat Bangsa.

agar semuanya dapat berjalan dengan lancar, dan segala sesuatunya menjadi serba transparan. Berikut ini adalah beberapa persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon jama'ah haji yang ingin bergabung di KBIH Amanat Bangsa, yakni antara lain:

1. Mengisi formulir pendaftaran.
2. Menyerahkan photo copy BPIH dari bank.
3. Menyerahkan photo copy SPPH dari Depag.
4. Menyerahkan pas photo ukuran 3 x 4 sebanyak 3 lembar.
5. Menyerahkan photo copy KTP sebanyak 1 lembar.
6. Menyerahkan sumbangan untuk biaya manasik dan biaya bimbingan sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah).

Sedangkan bagi jama'ah yang proses pendaftarannya (*indent*) melalui KBIH, maka wajib memenuhi syarat-syarat pendaftaran sebagai berikut:

1. Mengisi formulir pendaftaran.
2. Menyerahkan pas photo ukuran 3 x 4 sebanyak 6 lembar.
3. Menyerahkan photo copy KTP sebanyak 5 lembar.
4. Menyerahkan sumbangan untuk biaya manasik dan biaya bimbingan sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah).
5. Membayar beberapa juta rupiah untuk *indent*, dan semua urusan pendaftaran dipertanggung jawabkan KBIH dengan sebaik-baiknya serta bertanggung jawab atas kemabruran jama'ah haji dari sisi manasiknya.⁶

⁶ Data di atas di adopsi dari profil KBIH Amanat Bangsa dalam bentuk brosur.

G. Kegiatan Bimbingan Ibadah Haji di KBIH Amanat Bangsa

Selain berfungsi sebagai sebuah lembaga profesional yang membantu pemerintah dalam hal pelaksanaan ibadah haji, KBIH Amanat Bangsa juga menyusun sendiri berbagai kegiatan yang diorientasikan bagi calon jama'ah hajinya. Kegiatan yang disusun tersebut tidak hanya dilakukan pada saat masih berada di tanah air saja, tetapi juga dilakukan pada saat berada di tanah suci Makkah dan Madinah. Berikut ini adalah rincian kegiatan yang disusun oleh KBIH Amanat Bangsa bagi calon jama'ah hajinya, yakni antara lain:

1. Membimbing proses pendaftaran bagi yang memerlukan.
2. Menyelenggarakan manasik haji di tempat pendaftaran.
3. Menyusun pramanifes, sehingga rombongan, regu dan anggotanya sudah dapat diketahui sebelum pemberangkatan.
4. Melaksanakan istighotsah, bimbingan dan tanya jawab di asrama haji Sukolilo, Maktab, Arofah, dan Mina.
5. Membimbing dan memonitor kegiatan arbain, rukun, wajib, larangan, sunnah haji dan umrah.
6. Melaksanakan ziarah di:
 - a. Madinah, yang meliputi: Raudhah, Baqi, masjid Quba, masjid Qiblatain, masjid Jum'at, percetakan al-Qur'an, Jabal Uhud, Khondaq, masjid Umar, masjid Abu Bakar, masjid al-Ghamamah, masjid Bilal, dan masjid al-Ijabah.

- b. Makkah, yang meliputi: Jabal Qubais, lokasi rumah Siti Khadijah, lokasi tempat kelahiran nabi, museum Haramain, Ma'la, Ji'rana, Arafah, Muzdalifah, Mina, masjid Namirah, masjid Mas'aril Haram, Bi'ru Tuwa, masjid Khaif, Jamarat, Jabal Rahmah, Jabal Nur, Jabal Tsur, Khudaibiyah, dan Wadi Fatimah.
 - c. Jeddah, yang meliputi: makam Siti Hawa, tempat Qishas, laut Merah, masjid di atas laut, dan keliling kota Jeddah.
7. Membimbing jama'ah untuk berdo'a bersama-sama di tempat-tempat istijabah.
 8. Berkunjung ke ulama/*masyayich* untuk meminta do'a dan nasehat.
 9. Mengantar para jama'ah yang berminat untuk mendaki gua Hira' (tempat turunnya wahyu yang pertama), gua Tsur (tempat perlindungan nabi saat hijrah dari Makkah ke Madinah).⁷

H. Beberapa Kelebihan KBIH Amanat Bangsa

Tanpa bermaksud menunjukkan sebuah kesombongan, –menurut pengurus KBIH Amanat Bangsa– bahwa keberadaan KBIH Amanat Bangsa di tengah-tengah derasnya persaingan antar lembaga yang serupa –yakni lembaga yang bergerak dalam bidang pemberian pelayanan dan bimbingan ibadah haji dan

⁷ Hasil wawancara dengan Bapak Drs. K.H. Asep Saifuddin Chalim, MA (Ketua KBIH Amanat Bangsa), pada tanggal 22 Agustus 2005. Dan juga di sarikan dari profil KBIH Amanat Bangsa dalam bentuk brosur.

BAB V

PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA

A. Penyajian Data

1. Koordinasi yang diterapkan di KBIH Amanat Bangsa

Secara teoritis, meski pola koordinasi dapat di klasifikasikan menjadi tiga macam, yakni: koordinasi vertikal atau koordinasi struktural, koordinasi horizontal, dan koordinasi diagonal. Namun dalam praktiknya, pengurus KBIH Amanat Bangsa lebih menerapkan model koordinasi horizontal. Model koordinasi horizontal ini memiliki pengertian sebagai model koordinasi yang menekankan adanya tingkat kedudukan antara yang mengkoordinasikan dan yang dikoordinasikan mempunyai tingkat eselon yang sama. Dalam konteks KBIH Amanat Bangsa, meski masing-masing pengurus memiliki beban tugas dan tanggung jawab masing-masing, namun mereka tidak menganggap bahwa jabatan atau kedudukannya lebih tinggi dibandingkan dengan pengurus yang lainnya. Hal inilah yang menegaskan bahwa dalam tubuh KBIH Amanat Bangsa telah menerapkan model koordinasi horizontal.

Kenyataan yang terjadi justru sebaliknya, para pengurus KBIH Amanat Bangsa dalam menjalankan tugasnya senantiasa melakukan koordinasi antara pengurus yang satu dengan pengurus yang lainnya. Jadi,

meski dalam menjalankan tugasnya pengurus mengerjakan beban amanat yang dipikulnya seorang diri, namun senantiasa melakukan komunikasi sebagai wujud koordinasi dengan pengurus yang lainnya. Ilustrasi nyata yang menggambarkan adanya koordinasi horizontal dalam tubuh KBIH Amanat Bangsa tersebut misalnya dalam masalah perekrutan Jama'ah haji maupun umrah. Menurut penuturan salah seorang pengurus KBIH Amanat Bangsa, perekrutan jama'ah haji maupun umrah bagi KBIH Amanat Bangsa merupakan sebuah rutinitas yang senantiasa dilakukan sehari-hari. Dalam hal ini, semua pengurus yang tergabung dalam KBIH Amanat Bangsa menjalankan aktivitas ini, meski tidak terikat oleh waktu dan tempat tertentu. Dengan kata lain, tugas melakukan perekrutan jama'ah haji di KBIH Amanat Bangsa tidak hanya dilakukan oleh salah satu atau beberapa pengurus saja, tetapi juga dilakukan oleh semua pengurus, tak terkecuali ketua KBIH Amanat Bangsa. Setelah pengurus berhasil merekrut calon jama'ah haji atau umrah, maka selanjutnya mereka melaporkannya kepada kepala bagian administrasi (Kabag. Administrasi) KBIH Amanat Bangsa, karena Kabag. Administrasi inilah yang bertanggung jawab penuh mendata para calon jama'ah haji yang ingin bergabung di KBIH Amanat Bangsa. Begitu pun halnya dengan aktivitas rutin yang dilakukan oleh KBIH Amanat Bangsa lainnya, senantiasa melibatkan aspek koordinasi antar pengurusnya. Hal itu

dilakukan agar semuanya dapat berjalan dengan lancar dan segala sesuatunya menjadi serba transparan.¹

2. Faktor Pendukung dan Penghambat Terwujudnya Koordinasi di KBIH Amanat Bangsa

Dalam sejarah eksistensinya, KBIH Amanat Bangsa tidak dapat dilepaskan dari adanya faktor pendukung dan penghambat proses terwujudnya koordinasi yang dilakukan. Dengan kata lain, faktor pendukung dan penghambat inilah yang senantiasa mewarnai keberadaan KBIH Amanat Bangsa dalam upaya mewujudkan proses koordinasi. Faktor pendukung tersebut antara lain:

- a. Dalam kiprahnya di masyarakat, KBIH Amanat Bangsa yang konsern pada upaya pemberian pelayanan dan himbangan ibadah haji maupun umrah senantiasa mendapatkan apresiasi dan respon yang positif dari masyarakat sekitar khususnya, maupun dari masyarakat umum.
- b. Jama'ah haji yang bergabung dalam KBIH Amanat Bangsa secara umum dapat dikategorikan sebagai kelompok masyarakat yang memiliki tingkat ekonomi di atas rata-rata.
- c. Pada kenyataannya, KBIH Amanat Bangsa seringkali menyelenggarakan kegiatan keagamaan maupun aksi sosial di masyarakat, sehingga mendapatkan simpati dari berbagai kalangan masyarakat.

¹ Hasil wawancara dengan Bapak Drs. K.H. Asep Saifuddin Chalim, MA (Ketua KBIH Amanat Bangsa), pada tanggal 22 Agustus 2005.

- d. Mayoritas pengurus KBIH Amanat Bangsa bertempat tinggal tidak jauh dari lokasi KBIH, sehingga mudah untuk senantiasa memberikan pelayanan kepada masyarakat yang ingin memanfaatkan jasa KBIH Amanat Bangsa.
- e. Ketua umum KBIH Amanat Bangsa, yakni Bapak Asep Syaifuddin Chalim adalah orang yang cukup dikenal, karena beliau adalah keturunan dari salah seorang pendiri Nahdlatul Ulama (NU), yakni K.H. Abdul Chalim yang berasal dari Cirebon, Jawa Barat, sehingga tidak mengherankan jika beliau memiliki kharisma yang luar biasa di mata masyarakat.

Dari beragam faktor pendukung yang dimiliki oleh KBIH Amanat Bangsa di atas, hal itulah yang menjadi dasar utama KBIH Amanat Bangsa sampai saat ini masih mendapatkan kepercayaan dari anggota masyarakat yang ingin mendapatkan pelayanan dan bimbingan ibadah haji maupun umrah ke tanah suci. Meski demikian, dalam proses terwujudnya koordinasi yang dilakukan oleh KBIH Amanat Bangsa, juga tidak dapat dilepaskan dari beberapa faktor penghambat yang senantiasa berupaya dipecahkan oleh para pengurus KBIH Amanat Bangsa. Beberapa faktor penghambat terwujudnya koordinasi di KBIH Amanat Bangsa tersebut antara lain:

- a. Area KBIH Amanat Bangsa yang kurang strategis, yakni berada di tengah-tengah perkampungan (jauh dari jalan raya dan kondisi jalan yang tidak

- lebar) merupakan salah satu pemicu kurangnya akses masyarakat dalam memanfaatkan jasa KBIH Amanat Bangsa.
- b. Minimnya fasilitas kantor kesekretariatan yang dimiliki oleh KBIH Amanat Bangsa. Bahkan papan nama organisasi pun tidak ada di area KBIH. Hal inilah yang menjadi salah satu sebab sulitnya masyarakat dalam berkoordinasi dengan KBIH Amanat Bangsa, karena ketidaktahuan mereka dengan lokasi KBIH Amanat Bangsa.
 - c. Kurangnya tenaga administrasi, khususnya yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan. Sehingga efektivitas penyaluran uang ke pondok pesantren seringkali mengalami kendala.²

B. Analisis Data Tentang Koordinasi yang Diterapkan di KBIH Amanat Bangsa dan Faktor Pendukung serta Penghambat Terwujudnya Koordinasi di KBIH Amanat Bangsa

Berdasarkan pada penyajian data tentang koordinasi yang diterapkan di dalam tubuh KBIH Amanat Bangsa dan adanya faktor pendukung serta penghambat terwujudnya koordinasi di KBIH Amanat Bangsa tersebut di atas, maka secara mendasar dapat disimpulkan bahwa dalam melakukan aktivitas rutin KBIH, yakni melakukan proses perekrutan dan pembimbingan jama'ah haji dan umrah, pengurus KBIH Amanat Bangsa menerapkan model koordinasi horizontal.

² Hasil wawancara dengan Bapak Asep Saifuddin Chalim (Ketua KBIH Amanat Bangsa), pada tanggal 22 Agustus 2005.

Artinya pengurus KBIH Amanat Bangsa tidak mengklaim bahwa jabatan atau kedudukan yang dipikulnya lebih tinggi dari pengurus KBIH Amanat Bangsa yang lainnya. Prinsip kesejajaran inilah yang senantiasa ditekankan oleh semua pengurus KBIH Amanat Bangsa dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya masing-masing. Sehingga tak ayal jika dalam melaksanakan tugasnya, mereka tidak segan-segan untuk berkomunikasi sebagai wujud dari koordinasi dengan pengurus KBIH Amanat Bangsa yang lainnya. Di samping itu, dalam menjalankan tugasnya masing-masing, pengurus KBIH Amanat Bangsa senantiasa bahu-membahu untuk saling melengkapi kekurangan dari pengurus KBIH Amanat Bangsa yang lainnya.

Meski demikian, proses terwujudnya koordinasi yang diterapkan oleh KBIH Amanat Bangsa tidak dapat dilepaskan dari adanya faktor pendukung dan penghambat yang senantiasa mengiringinya. Faktor pendukung yang menjadi sebab terwujudnya proses koordinasi di KBIH Amanat Bangsa antara lain: *pertama*, adanya kenyataan bahwa KBIH Amanat Bangsa senantiasa konsern pada upaya pemberian pelayanan dan bimbingan ibadah haji maupun umrah, sehingga mendapatkan apresiasi dan respon yang positif dari masyarakat sekitar khususnya, maupun dari masyarakat umum. *Kedua*, jama'ah haji maupun umrah yang bergabung dalam KBIH Amanat Bangsa secara umum dapat dikategorikan sebagai kelompok masyarakat yang memiliki tingkat ekonomi di atas rata-rata. *Ketiga*, adanya kenyataan bahwa KBIH Amanat Bangsa seringkali menyelenggarakan kegiatan keagamaan maupun aksi sosial di masyarakat,

sehingga mendapatkan simpati dari berbagai kalangan masyarakat. *Keempat*, mayoritas pengurus KBIH Amanat Bangsa bertempat tinggal tidak jauh dari lokasi KBIH, sehingga mudah untuk senantiasa memberikan pelayanan kepada masyarakat yang ingin memanfaatkan jasa KBIH Amanat Bangsa. Dan *kelima*, ketua umum KBIH Amanat Bangsa, yakni Bapak Asep Syaifuddin Chalim adalah orang yang cukup dikenal, karena beliau adalah keturunan dari salah seorang pendiri Nahdlatul Ulama (NU), yakni K.H. Abdul Chalim yang berasal dari Cirebon, Jawa Barat, sehingga tidak mengherankan jika beliau memiliki kharisma yang luar biasa di mata masyarakat. Sedangkan faktor penghambat terwujudnya proses koordinasi di dalam tubuh KBIH Amanat Bangsa yang hingga saat ini belum terpecahkan adalah: *pertama*, area KBIH Amanat Bangsa yang kurang strategis, yakni berada di tengah-tengah perkampungan (jauh dari jalan raya dan kondisi jalan yang tidak lebar), sehingga menyebabkan kurangnya akses masyarakat dalam memanfaatkan jasa KBIH Amanat Bangsa. *Kedua*, minimnya fasilitas kantor kesekretariatan yang dimiliki oleh KBIH Amanat Bangsa. Sehingga menyebabkan sulitnya masyarakat dalam berkoordinasi dengan KBIH Amanat Bangsa. Dan *ketiga*, kurangnya tenaga administrasi, khususnya yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan. Sehingga efektivitas penyaluran uang ke pondok pesantren seringkali mengalami kendala.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari berbagai pemaparan dan penjelasan yang dikemukakan secara panjang lebar pada bab-bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Koordinasi yang diterapkan di KBIH Amanat Bangsa dalam upaya melakukan perekrutan dan pembimbingan jama'ah haji dan umrah adalah koordinasi horizontal. Artinya pengurus KBIH Amanat Bangsa tidak mengklaim bahwa jabatan atau kedudukan yang dipikulnya lebih tinggi dari pengurus KBIH Amanat Bangsa yang lainnya. Prinsip kesejajaran inilah yang senantiasa ditekankan oleh semua pengurus KBIH Amanat Bangsa dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya masing-masing. Sehingga tak ayal jika dalam melaksanakan tugasnya, mereka tidak segan-segan untuk berkomunikasi sebagai wujud dari koordinasi dengan pengurus KBIH Amanat Bangsa yang lainnya. Di samping itu, dalam menjalankan tugasnya masing-masing, pengurus KBIH Amanat Bangsa senantiasa bahu-membahu untuk saling melengkapi kekurangan dari pengurus KBIH Amanat Bangsa yang lainnya.
2. Faktor pendukung terwujudnya koordinasi di KBIH Amanat Bangsa antara lain: *pertama*, adanya kenyataan bahwa KBIH Amanat Bangsa senantiasa

konsern pada upaya pemberian pelayanan dan bimbingan ibadah haji maupun umrah. *Kedua*, jama'ah haji maupun umrah yang bergabung dalam KBIH Amanat Bangsa secara umum dapat dikategorikan sebagai kelompok masyarakat yang memiliki tingkat ekonomi di atas rata-rata. *Ketiga*, adanya kenyataan bahwa KBIH Amanat Bangsa seringkali menyelenggarakan kegiatan keagamaan maupun aksi sosial di masyarakat. *Keempat*, mayoritas pengurus KBIH Amanat Bangsa bertempat tinggal tidak jauh dari lokasi KBIH. Dan *kelima*, ketua umum KBIH Amanat Bangsa, yakni Bapak Asep Syaifuddin Chalim adalah orang yang cukup dikenal, karena beliau adalah keturunan dari salah seorang pendiri Nahdlatul Ulama (NU), yakni K.H. Abdul Chalim yang berasal dari Cirebon, Jawa Barat. Sedangkan faktor penghambat terwujudnya proses koordinasi di KBIH Amanat Bangsa antara lain: *pertama*, area KBIH Amanat Bangsa yang kurang strategis. *Kedua*, minimnya fasilitas kantor kesekretariatan yang dimiliki oleh KBIH Amanat Bangsa. Dan *ketiga*, kurangnya tenaga administrasi, khususnya yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan.

B. Rekomendasi

Sebagai upaya pemberian solusi dalam kaitannya dengan koordinasi yang diterapkan oleh KBIH Amanat Bangsa dan faktor pendukung serta penghambat terwujudnya koordinasi di KBIH Amanat Bangsa, maka ada dua hal yang perlu menjadi pertimbangan pengurus KBIH Amanat Bangsa dalam melakukan proses

koordinasi di masa-masa mendatang: *pertama*, hendaknya pengurus KBIH Amanat Bangsa mempertahankan model koordinasi horizontal yang selama ini telah diterapkan. Karena model koordinasi horizontal inilah yang tepat untuk diterapkan di dalam KBIH Amanat Bangsa guna terciptanya suasana kerja yang harmonis di dalamnya. Dan *kedua*, hendaknya pengurus KBIH Amanat Bangsa senantiasa berupaya semaksimal mungkin untuk menekan faktor penghambat terwujudnya proses koordinasi, misalnya dengan cara menyisihkan sebagian keuntungan yang diperoleh untuk melengkapi fasilitas KBIH, sehingga kredibilitas KBIH Amanat Bangsa semakin mendapatkan apresiasi dari masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Ghizz, Muhammad. 1995. *Fathul Qaribil Mujiib*. Terjemahan Ibnu Zuhri. Cet. 1. Bandung : Trigenda Karya.
- Arikunto, Suharsimi. 1998. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*. Edisi Revisi 4. Cet. 11. Jakarta : Rineka Cipta.
- Azwar, Saifuddin. 2001. *Metode Penelitian*. Edisi 1. Cet. 3. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Bungin, Burhan. 2003. *Analisis Data Penelitian Kualitatif: Pemahaman Filosofis dan Metodologis Ke Arah Penguasaan Model Aplikasi*. Edisi 1. Cet. 3. Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Departemen Agama R.I. 1984. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Edisi Revisi. Surabaya : Jaya Sakti.
- Gitosudarmo, Indriyo dan Agus Mulyono. 2001. *Prinsip Dasar Manajemen*. Edisi 3. Cet. 4. Yogyakarta : BPFE.
- Hanafi, Mamduh M. 1993. *Manajemen*. Cet. 1. Yogyakarta : UPP AMP YKPN.
- Handoko, T. Hani. 1989. *Manajemen*. Edisi 2. Cet. 2. Jakarta : BPFE.
- Hardjito, Dydiet. 1997. *Teori Organisasi dan Teknik Pengorganisasian*. Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Hasan, M. Iqbal. 2002. *Pokok-pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*. Cet. 1. Jakarta : Ghalia Indonesia.
- Idris, Abdul Fatah dan Abu Ahmadi. 1990. *Fiqih Islam Lengkap*. Jakarta : Rineka Cipta.
- Jailani, 'Abdul Qadir. 2001. *Fiqih Tasawuf*. Terjemahan Muhammad Abdul Ghoffar. Cet. 1. Bandung : Pustaka Hidayah.

- Ja'far, Muhammadiyah. 1997. *Tuntunan Praktis Ibadah Zakat, Puasa dan Haji*. Cet. 3. Jakarta : Kalam Mulia.
- Manila, I.GK. 1996. *Praktek Manajemen Pemerintahan dalam Negeri*. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama.
- Manullang, M. 1996. *Dasar-dasar Manajemen*. Medan : Ghalia Indonesia.
- Moleong, Lexy J. 2002. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Cet. 17. Bandung : Remaja Rosdakarya.
- Narbuko, Cholid dan Abu Achmadi. 1997. *Metodologi Penelitian*. Cet. 1. Jakarta : Bumi Aksara.
- Nasution, S. 1982. *Metode Research*. Edisi 1. Bandung : Jemmars.
- Nazir, Moh. 1999. *Metode Penelitian*. Cet. 4. Jakarta : Ghalia Indonesia.
- Raya, Ahmad Thib dan Siti Musdah Mulia. 2003. *Menyelami Seluk-beluk Ibadah dalam Islam*. Jakarta : Kencana.
- Sabarguna, Boy S. 2005. *Analisis Data Pada Penelitian Kualitatif*. Cet. 1. Jakarta : UI Press.
- Sadler, Philip. 1991. *Mendesain Organisasi*. Jakarta : Pustaka Binaman Pressindo.
- Strauss, Anselm & Juliet Corbin. 2003. *Dasar-dasar Penelitian Kualitatif*. Terjemahan Muhammad Shodiq & Imam Muttaqien. Cet. 1. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Sutarto. 1996. *Dasar-dasar Organisasi*. Cet. 17. Jakarta : Gadjah Mada University Press.
- Widjaya. 1987. *Perencanaan sebagai Fungsi Manajemen*. Jakarta : Bina Aksara.
- Winardi. 1990. *Kepemimpinan dalam Manajemen*. Cet. 1. Jakarta : Rineka Cipta.